

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI LAMPUNG
2018



<https://lampung.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI LAMPUNG
2018

<https://lampung.bps.go.id>



Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2018

ISBN : 978-602-7746-51-0

No. Publikasi: 18550.1908

Katalog: 4102002.18

Ukuran Buku: 17,6 X 25 cm

Jumlah Halaman: xiv + 137 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung

Desain Kover oleh:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung

Penerbit:

©BPS Provinsi Lampung

Pencetak:

CV. Jaya Wijaya

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG 2018

Pengarah : Yeane Irmaningrum S.
Penanggung Jawab Umum : Nurul Andriana
Penanggung Jawab Teknis : Yosep
Penyusun : Mega Astuti
Penulis dan Pengolah Data : Mega Astuti
Editor : Nurul Andriana, Yosep
Layout Setting : Muhammad Shalih

Kata Pengantar

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*).

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu ukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990. IPM mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu: aspek umur panjang dan hidup sehat (*Long and Healthy Life*), pengetahuan (*Knowledge*) dan standar hidup layak (*Decent Standard of Living*).

Publikasi ini merupakan kajian dan analisa dari kegiatan eksplorasi data, dan diperkuat dengan wawancara langsung ke rumah tangga, serta diperkaya oleh hasil *Focus Group Discussion (FGD)* IPM. Tujuan laporan ini untuk memberikan gambaran kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung tentang status dan kondisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan kegiatan INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2018. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pengguna.

Bandar Lampung, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung,



YEANE IRMANINGRUM S, MA.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Perkembangan Pemikiran dan Konsep Pembangunan	1
1.2. Upaya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia	4
1.3. Pengukuran Pembangunan Manusia	8
1.4. Tujuan Penulisan	9
BAB 2. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI LAMPUNG	11
2.1. Perkembangan Pembangunan Manusia	11
2.2. Tantangan Pembangunan Manusia	17
BAB 3. TANTANGAN UTAMA DALAM PENCAPAIAN SASARAN KESEHATAN	23
3.1. Angka Harapan Hidup	24
3.2. Morbiditas.....	27
3.3. Tantangan Pembangunan Manusia Dimensi Kesehatan	29

BAB 4. TANTANGAN UTAMA DALAM PENCAPAIAN SASARAN	
PENDIDIKAN	49
4.1. Pencapaian Partisipasi Pendidikan Dasar Menggembirakan .	51
4.2. Tantangan Pembangunan Manusia Dimensi Pendidikan.....	55
BAB 5. TANTANGAN UTAMA DALAM PENCAPAIAN SASARAN	
EKONOMI	67
5.1. Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung.....	71
5.2. Karakteristik Defisiensi Lapangan Kerja Produktif dan Pekerjaan yang Layak	75
5.3. Tantangan dan Peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.....	95
BAB 6. DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	113
6.1. Disparitas jenis kelamin.....	113
6.2. Disparitas antar kabupaten/kota	120
BAB 7. TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
MANUSIA.....	129

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Perkembangan IPM Provinsi Lampung dan Indonesia.....	12
Gambar 2.2 Status Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2018	13
Gambar 2.3 Angka Harapan Hidup menurut Provinsi di Indonesia 2018	14
Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah menurut Provinsi di Indonesia, 2018	15
Gambar 2.5 Rata-rata Lama Sekolah menurut Provinsi di Indonesia, 2018	16
Gambar 2.6 Pengeluaran Per kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2018	17
Gambar 2.7 Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018.....	18
Gambar 2.8 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.....	19
Gambar 2.9 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.....	20
Gambar 2.10 Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.....	21
Gambar 2.11 Pengeluaran Perkapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.....	22

Gambar 3.1 <i>Tren</i> Angka Harapan Hidup Indonesia dan Provinsi Lampung.....	25
Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.....	26
Gambar 3.3 Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Usia Kawin Pertama Kurang dari 16 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018	30
Gambar 3.4 Kebutuhan Pelayanan KB yang Tidak Terpenuhi di Provinsi Lampung (Persen), 2012	31
Gambar 3.5 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung (per seribu kelahiran hidup), 2007 dan 2012	32
Gambar 3.6 Cakupan Indikator ANC K1 dan ANC Minimal 4 Kali menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013	34
Gambar 3.7 Persentase Penolong Kelahiran Terakhir yang Ditangani Non Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2018.....	37
Gambar 3.8 Persentase Desa yang Mudah Mengakses Puskesmas menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung, 2018.....	38
Gambar 3.9 Persentase Desa yang Sulit Menjangkau Rumah Sakit	39
Gambar 3.10 Persepsi Masyarakat Menurut Jenis Permasalahan di Rumah Sakit dan Puskesmas Provinsi Lampung (Persen), 2015	40
Gambar 3.11 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap menurut.....	41
Gambar 3.12 Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantai Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018	47
Gambar 3.13 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018.....	48

Gambar 4.1 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2018	54
Gambar 4.2 Persepsi Masyarakat yang Menyatakan Biaya Sekolah Memberatkan menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung (Persen), 2015	58
Gambar 4.3 Persepsi Masyarakat yang Menyatakan Biaya Sekolah SLTA/ sederajat Memberatkan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2015	59
Gambar 4.4 Persepsi Masyarakat terhadap Fasilitas Pendidikan Cukup Berkualitas menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung (Persen), 2015	62
Gambar 5.1 Tiga Dimensi dan Tujuan ke-8 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	69
Gambar 5.2 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional 2014-2018	73
Gambar 5.3 Kontribusi Sektor Dominan PDRB Provinsi Lampung (Persen), 2018	76
Gambar 5.4 Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Lampung dan Indonesia (Persen), 2014-2018	77
Gambar 5.5 Konsep <i>Windows of Opportunity</i>	81
Gambar 5.6 Perkembangan Penduduk yang Bekerja menurut Kegiatan Ekonomi Formal dan Informal di Provinsi Lampung, Februari 2017-Agustus 2018	84
Gambar 5.7 Perkembangan Penduduk yang Bekerja menurut Kegiatan Ekonomi Formal/Informal dan Kota-Desa di Provinsi Lampung, Februari 2017 - Agustus 2018	86
Gambar 5.8 Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin	87

Gambar 5.9 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, Februari-Agustus 2018	89
Gambar 5.10 Setengah Pengangguran di Provinsi Lampung, Agustus 2017-2018	91
Gambar 5.11 Perkembangan Inflasi Kota Bandar Lampung 2014-2018	92
Gambar 5.12 Persepsi Masyarakat yang Menyatakan Jalan Utama Berkualitas menurut Jenis Jalan Provinsi Lampung (Persen), 2015	111
Gambar 6.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung, 2010-2018.....	116
Gambar 6.2 Perkembangan Umur Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2010-2018 (Tahun).....	117
Gambar 6.3 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2010-2018 (Tahun).....	118
Gambar 6.4 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2010-2018 (Tahun).....	119
Gambar 6.5 Perkembangan Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan	120
Gambar 6.6 Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018.....	121
Gambar 6.7 Selisih Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Tahun).....	123
Gambar 6.8 Selisih Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Tahun).....	124
Gambar 6.9 Selisih Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Tahun).....	126

Gambar 6.10 Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Ribu Rupiah/Tahun)	127
--	-----

<https://lampung.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Indikator Morbiditas Provinsi Lampung, 2016-2018.....	28
Tabel 3.2 Indikator Morbiditas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018.....	29
Tabel 4.1 APS dan APM Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2016-2018.....	53
Tabel 4.2 Jarak Desa dengan Fasilitas Pendidikan SD, SMP, SLTA dan SMK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen) 2018.....	60
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Lampung, 2014-2018	74
Tabel 5.2 Perbandingan Upah Minimum Regional/Provinsi Se-Sumatera (Rupiah), 2014-2018	79
Tabel 5.3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin	82
Tabel 5.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk menurut Kriteria Bank Dunia	94
Tabel 5.5 Pemanfaatan KUR, Kredit Bank Bukan KUR, PNPM, dan Koperasi di Provinsi Lampung berdasarkan Golongan Pengeluaran, 2018.....	98
Tabel 5.6 Panjang Jalan Negara dan Jalan Provinsi Provinsi Lampung	110

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

1.1. Perkembangan Pemikiran dan Konsep Pembangunan

Sebelum memasuki Tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Namun pada perkembangan selanjutnya, Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Fokus pembangunan yang terpenting menurut Sen adalah manusia itu sendiri. Manusia bukan sekedar buruh semata. Manusia bukan sekedar *homo economicus*. Pembangunan, seharusnya

merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya (*development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*). Pada tahun 1991 Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan” (World Development Report).

Hasil kajian Mankiw et. Al. (1992) menemukan bahwa 80% perbedaan pertumbuhan perekonomian antar negara adalah disebabkan oleh faktor modal fisik dan modal manusia, sedangkan 20% lagi sisanya karena faktor-faktor lain. Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Mereka dapat mempunyai akses pada sumber daya ekonomi serta dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report 1990). Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia.

Namun demikian pembangunan harus seimbang, yaitu antara membangun kemampuan dengan memanfaatkan kemampuan. Proses pembangunan setidaknya harus menciptakan lingkungan untuk manusia, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat, mengembangkan kemampuannya secara optimal dan mempunyai cukup kesempatan (memanfaatkan kemampuannya) untuk dapat hidup yang produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia tidak melulu peduli dengan pembentukan kemampuan manusia seperti kesehatan yang lebih baik serta pengetahuan dan keterampilan. Tetapi proses pembangunan manusia juga peduli dengan pemanfaatan kemampuan tersebut baik untuk bekerja, berlibur, serta kegiatan sosial politik lainnya. Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang. Ketimpangan akan berakibat pemborosan potensi manusia.

Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

UNDP memperkenalkan IPM sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM hingga tahun 2010 UNDP melakukan revisi yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini dikenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Indonesia mulai menghitung IPM secara berkala setiap tiga tahun sejak 1996. Untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun. Sejak tahun 2014, indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita digunakan sebagai proksi pendapatan yang menggantikan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang belum tersedia secara tahunan hingga tingkat kabupaten/kota. Angka *backcasting* dengan menggunakan metode baru tersedia mulai tahun 2010.

1.2. Upaya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) kini tengah menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, baik di tingkat dasar menengah maupun pendidikan tinggi dioptimalkan untuk mendorong daya saing bangsa.

Sesuai dengan tema pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan, yang salah satunya berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi.

Hal ini sejalan dengan upaya Provinsi Lampung mewujudkan visi RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera) yang dalam misinya juga menyinggung masalah pemerataan kualitas pelayanan public, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan bersama.

Kita juga bersyukur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam program pembangunan nasional.

Program SDGs menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kualitas sumber daya manusia

Di Indonesia, kondisi modal manusia saat ini di Indonesia, perlu mendapat perhatian yang besar. Skor Indonesia pada *Human Capital Index* tahun 2018 adalah 0,53. Ini berarti, secara rata-rata, seorang pekerja Indonesia pada generasi mendatang hanya akan memiliki produktivitas sebesar 53% dari potensi penuhnya bila ia menyelesaikan pendidikan dan memiliki akses penuh terhadap kesehatan. Walaupun seorang anak Indonesia hari ini secara umum akan menyelesaikan pendidikan selama 12,3 tahun saat ia berusia 18 tahun, secara rata-rata ia hanya akan menerima pembelajaran setara 7,9 tahun sekolah karena rendahnya mutu pendidikan. Selain itu, hampir sepertiga anak-anak Indonesia mengalami stunting, yang berarti mereka berisiko mengalami keterbatasan kognitif dan fisik seumur hidup.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, akses pendidikan yang berkualitas di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, baru sekitar 8,5% atau 15,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mampu lulus dari perguruan tinggi. Sebanyak 26,3% berpendidikan SMA, dan sisanya yaitu 65% hanya mengenyam pendidikan sampai di tingkat SMP (22,8%) dan SD (42,4%). Di sisi lain, dalam beberapa dekade ke depan Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. “Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi penentu dalam perubahan bagi kemajuan bangsa. Sejak tahun 2015, semua pembangunan pada tataran global mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development*

Goals (SDGs). Konsep SDGs ini berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 tentang isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dibentuk oleh tiga pilar dengan 17 tujuan (goal) yang harus dicapai.

Di antara 17 tujuan SDGs, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak Indonesia yang mengalami stunting pada tahun 1993 menunjukkan fungsi kognitif yang lebih rendah sebagai orang dewasa muda pada tahun 2014-2015, mengalami pendidikan formal yang lebih singkat, juga memiliki pendapatan yang lebih rendah saat dewasa. Diperkirakan jika Indonesia bisa menutup kesenjangan antara skor *Human Capital Index* saat ini dan skenario ideal kesehatan penuh dan pendidikan pada tingkat 4% per lima tahun, nilai tengah rata-rata di

antara negara-negara dalam basis data, perkiraan PDB per kapita akan menjadi 7,1% lebih tinggi pada tahun 2050

Dari sisi kualitas SDM, mayoritas tenaga kerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar dan menengah sebesar 41%. Skor *pisa test* Indonesia juga berada pada peringkat 62 dari 72 negara yang berarti tingkat literasi dan kualitas SDM Indonesia sangat rendah.

1.3. Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia diukur dengan indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penyusunan indeks menggunakan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan yang mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Masing-masing dimensi tersebut kemudian diukur dengan menggunakan indikator-indikator tertentu. Pertama, dimensi kesehatan. Pilar ini diwakili oleh indikator usia harapan hidup pada waktu lahir. Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk hidup terhitung sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Kedua, dimensi pendidikan. Pilar ini diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini dihitung pada usia tujuh tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar dan

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sementara itu, rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Ketiga, dimensi ekonomi yang diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan daya belinya melalui konsep "*purchasing power parity*". Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

1.4. Tujuan Penulisan

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Berdasarkan pengukuran pembangunan manusia seperti yang dijelaskan di atas, saat ini angka IPM lampung sudah termasuk pada kategori sedang. Namun jika dibandingkan

dengan provinsi lain khususnya se-Sumatera, nampak bahwa tingkat capaian IPM Provinsi Lampung berada pada posisi yang terendah. Hal ini tentunya menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah khususnya Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian mendalam terutama mengenai penyebab rendahnya pencapaian IPM Provinsi Lampung ini.

Tujuan dari kegiatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan tingkat dan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
2. Menggambarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia menurut dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.
3. Melakukan analisis perkembangan IPM antar kabupaten/kota dan disparitas IPM antar wilayah di Provinsi Lampung.

Perkembangan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

2

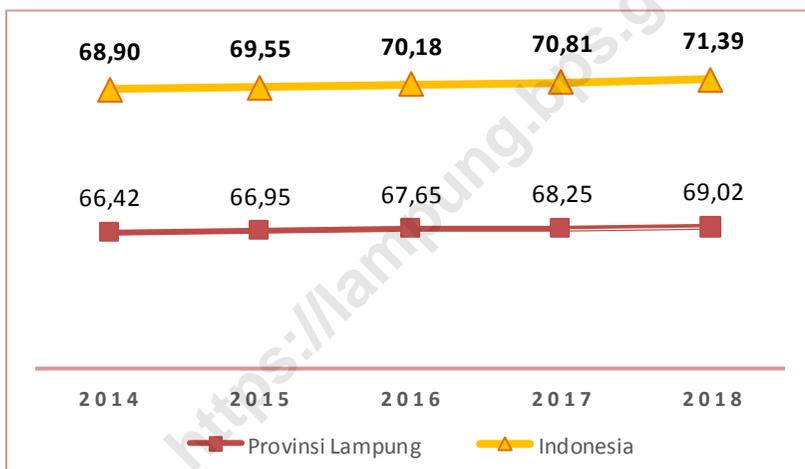
2.1. Perkembangan Pembangunan Manusia

Indonesia Pada Tataran Global dan ASEAN *United Nations Development Programme* (UNDP) secara berkesinambungan mencatat perkembangan pembangunan manusia di berbagai negara. Sampai dengan tahun 2017, UNDP telah mencatat perkembangan pembangunan manusia dari 189 negara di seluruh dunia. Pada tahun 2017, UNDP mencatat bahwa IPM di Indonesia telah mencapai 0,694. Capaian IPM ini mengalami peningkatan sebesar 0,003 dibandingkan dengan tahun 2016. Selama kurun waktu 1990 hingga 2017, IPM Indonesia tercatat tumbuh 1,02 persen per tahun. Dengan capaian IPM pada tahun 2017, pembangunan manusia di Indonesia masih berstatus “sedang”. Meskipun pembangunan manusia Indonesia berstatus “sedang”, saat ini Indonesia berada pada peringkat 116 dari 189 negara. Pada tataran global, capaian pembangunan manusia di Indonesia hampir mirip dengan Filipina, Afrika Selatan, Mesir, Vietnam, dan Bolivia. Bersama dengan kelima negara ini, capaian pembangunan manusia Indonesia hampir mencapai status “tinggi”.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung menunjukkan arah yang positif, selama lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 IPM Provinsi Lampung mencapai 66,42, kemudian terus meningkat menjadi 69,02 pada tahun 2018 atau naik

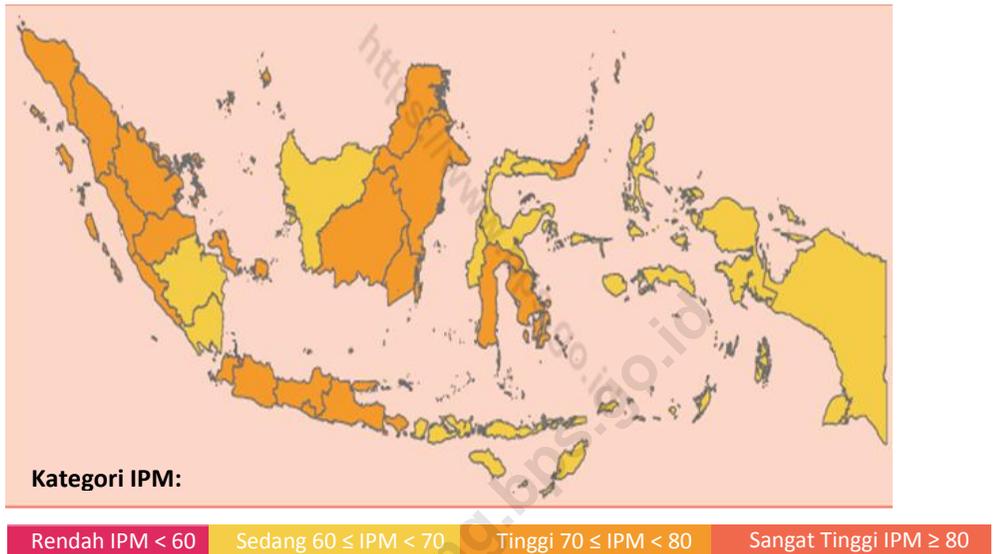
3,91 persen. Jika dibandingkan dengan nasional, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 2018 mencapai 71,39. Peningkatan IPM yang dicapai nasional pada periode yang sama juga mengalami kenaikan namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung. Angka IPM nasional selama 2014-2018 naik 3,61 persen.

Gambar 2.1 Perkembangan IPM Provinsi Lampung dan Indonesia 2014-2018



Berdasarkan status pembangunan manusia, nasional sudah termasuk dalam kategori tinggi sejak tahun 2016. Pembangunan manusia Provinsi Lampung tahun 2018 berstatus sedang, bersama 11 provinsi lainnya di Indonesia. Sementara provinsi yang status pembangunan manusianya tergolong tinggi terdapat sebanyak 21 provinsi. Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang berstatus pembangunan sangat tinggi dengan angka IPM 80 ke atas.

Gambar 2.2 Status Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2018



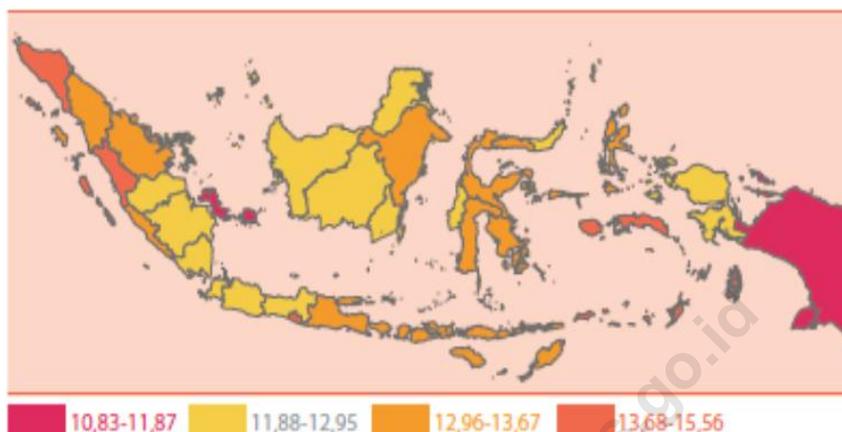
Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka IPM Provinsi Lampung terbentuk dari indikator-indikator pada tiga dimensi kehidupan, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dimensi Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Lampung pada tahun 2018 sudah mencapai 70 tahun yaitu sebesar 70,18 tahun. Harapan hidup di provinsi ini masih lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 71,20 tahun. Di Yogyakarta merupakan provinsi dengan AHH tertinggi di Indonesia yaitu 74,82 tahun, dan sebaliknya Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan AHH terendah yaitu 64,58 tahun.

Gambar 2.3 Angka Harapan Hidup menurut Provinsi di Indonesia, 2018

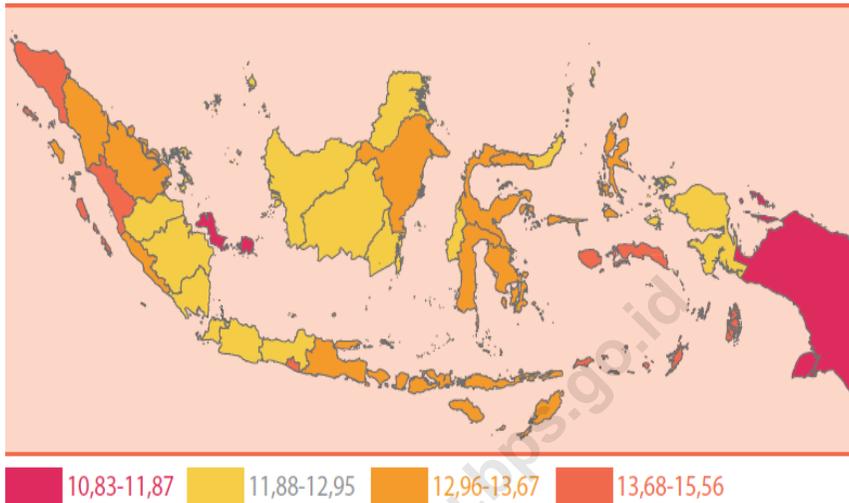


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimensi Pendidikan

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Lampung untuk tahun 2018 sebesar 12,61 tahun. Ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Provinsi Lampung mencapai tingkat tamat SLTA. Angka HLS Provinsi Lampung ini hanya sedikit dibawah rata-rata nasional yang mencapai 12,91 tahun, atau sampai pada tingkat menamatkan SLTA dan awal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Provinsi DI Yogyakarta yang memang terkenal sebagai daerah pelajar memiliki HLS tertinggi dibanding provinsi lainnya yaitu mencapai 15,56 tahun. Sebaliknya Papua memiliki angka HLS terendah se-Indonesia dengan angka 10,83 tahun atau baru mencapai tingkat 2 SLTA.

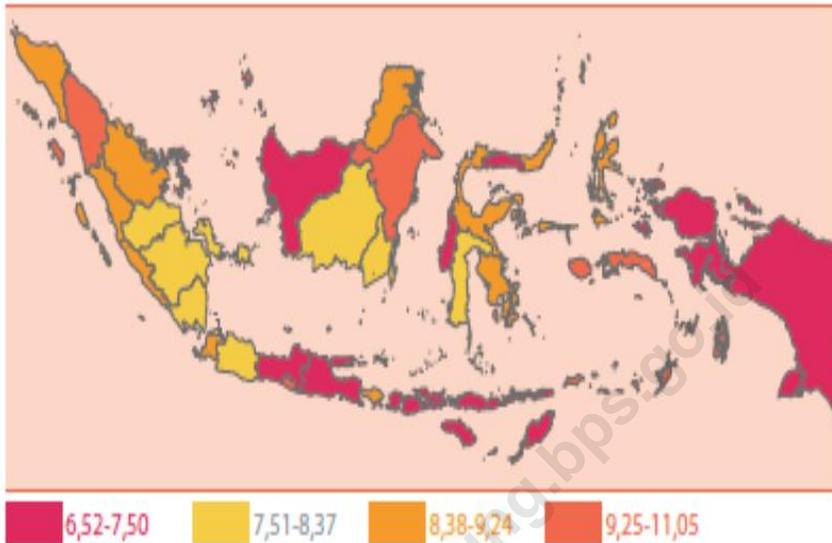
Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah menurut Provinsi di Indonesia, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara itu, untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Lampung tahun 2018 baru mencapai 7,82 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Lampung usia 25 tahun ke atas masih cukup jauh di bawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Dan secara nasional memang RLS baru mencapai 8,17 tahun atau hanya sedikit di atas RLS Provinsi Lampung. DKI Jakarta memiliki RLS tertinggi yaitu mencapai 11,05 tahun. Sedangkan Papua kembali menjadi Provinsi dengan capaian terendah yaitu RLS 6,52 tahun atau hanya mencapai tingkat 1 SLTP.

Gambar 2.5 Rata-rata Lama Sekolah menurut Provinsi di Indonesia, 2018

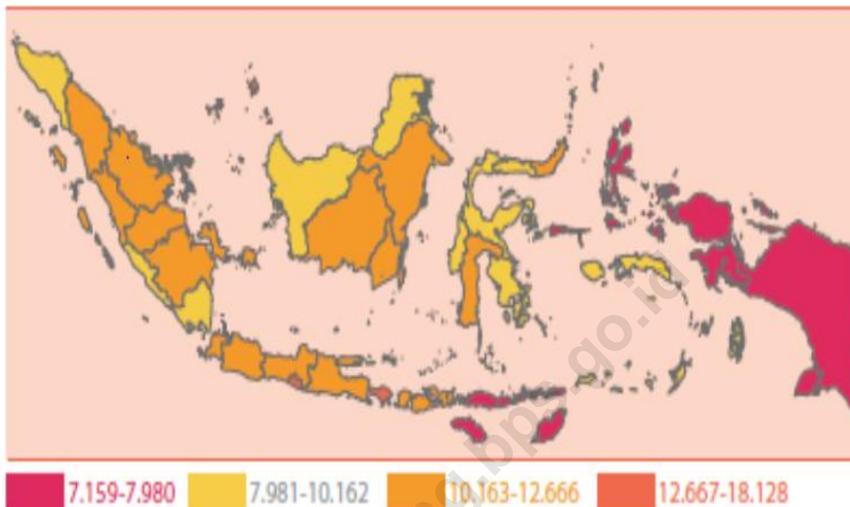


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimensi Ekonomi

IPM Provinsi Lampung dilihat dari faktor pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Lampung melakukan pengeluaran sebesar Rp9.858.000,- per kapita/tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai Rp11.059.000,- per kapita/tahun. Nilai pengeluaran tertinggi terdapat di DKI Jakarta yang mencapai Rp18.128.000,- per kapita/tahun atau hampir dua kali pengeluaran di Provinsi Lampung. Sementara itu pengeluaran per kapita Papua menjadi yang terendah yaitu hanya sebesar Rp7.159.000,- per kapita/tahun.

Gambar 2.6 Pengeluaran Per kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

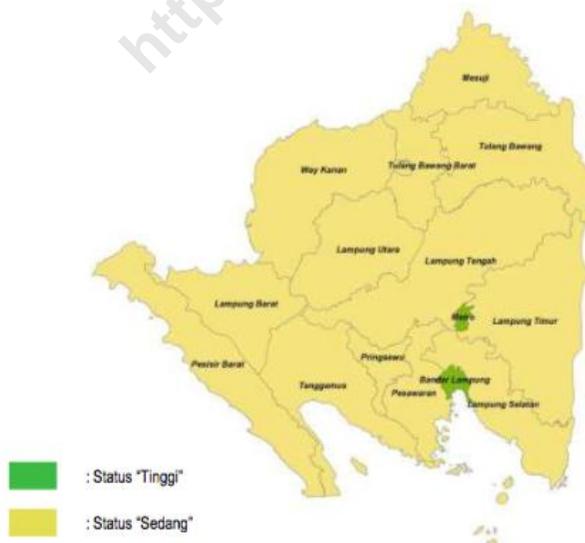
2.2. Tantangan Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang berbasis manusia, dimana manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dan menuntut adanya pemerataan dalam pembangunan. Sampai dengan tahun 2018 capaian IPM Provinsi Lampung masih berada dibawah IPM nasional. Bahkan di seluruh indikator pembentuk IPM yaitu harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita menunjukkan bahwa capaian Provinsi Lampung selalu berada di bawah nasional. Arah pembangunan ke depan harus memperhatikan upaya-upaya lebih meningkatkan capaian kinerja terutama yang terkait dengan indikator-indikator pembentuk IPM. Akar permasalahan yang menghambat pembangunan manusia

harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya agar pembangunan bisa berjalan baik dan berkelanjutan.

Adanya disparitas dalam pembangunan antar kabupaten/kota juga merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan manusia. Jika dilihat per kabupaten/kota se- Provinsi Lampung, nampak bahwa pembangunan manusia masih belum cukup merata. Capaian pembangunan manusia di beberapa daerah sudah ada yang termasuk dalam kategori tinggi, namun masih ada juga beberapa daerah yang capaiannya termasuk pada kategori sedang. Capaian IPM di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro contohnya, sudah jauh di atas IPM Provinsi Lampung yaitu masing-masing mencapai 76,63 dan 76,22. Sementara capaian pembangunan manusia di Kabupaten Mesuji merupakan yang terendah yaitu 62,88.

Gambar 2.7 Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Disparitas pembangunan manusia dimulai dari disparitas capaian di masing-masing dimensi. Derajat kesehatan penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih belum merata. Hal ini tergambar dari angka harapan hidup (AHH) yang cukup jauh perbedaannya antar daerah. AHH Kota Metro 2018 sudah mencapai 71,29 tahun sedangkan di Pesisir Barat baru mencapai 62,85 tahun.

Gambar 2.8 Angka Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dibidang pendidikan, disparitas capaian harapan lama sekolah juga masih cukup tinggi. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk di Kota Metro dan Bandar Lampung tahun 2018 sudah mencapai 14 tahun atau diharapkan sudah bisa bersekolah sampai pada tingkat perguruan tinggi, sementara HLS penduduk di Kabupaten Mesuji baru mencapai 11,61 tahun atau setingkat SLTA.

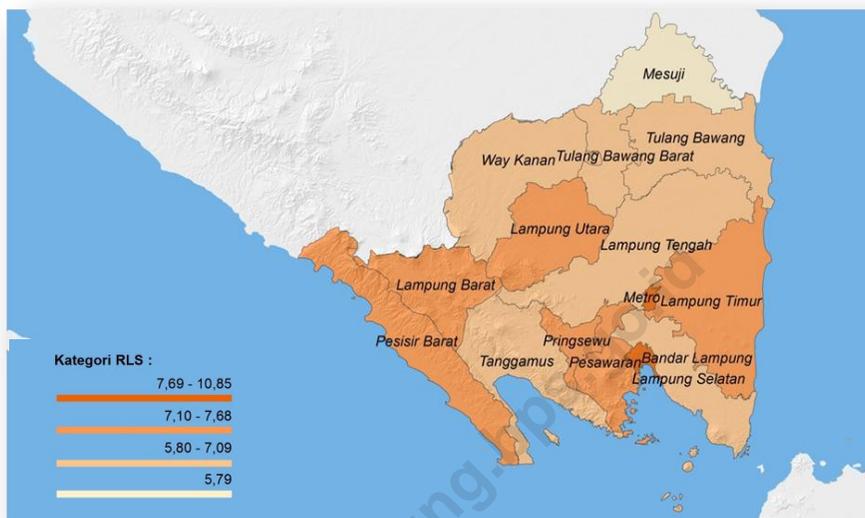
Gambar 2.9 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan indikator rata-rata lama sekolah (RLS), nampak bahwa pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun di wilayah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro relatif sudah terpenuhi, dengan lama sekolah mencapai 10 tahun. Sedangkan untuk wilayah kabupaten-kabupaten angka RLS belum mencapai delapan tahun. Bahkan di Kabupaten Mesuji dan Tanggamus rata-rata baru menamatkan sekolah dasar dengan angka RLS kurang dari tujuh tahun.

Gambar 2.10 Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk indikator IPM pada dimensi ekonomi, terlihat juga adanya kesenjangan antar daerah. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kota Bandar Lampung 2018 sudah mencapai Rp11.952.000,- per kapita/tahun, sedangkan di Pesawaran baru mencapai Rp7.724.000,- per kapita/tahun.

Gambar 2.11 Pengeluaran Perkapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tantangan Utama Dalam Pencapaian Sasaran Kesehatan

3

“The greatest wealth is health diterjemahkan kekayaan terbesar adalah kesehatan”.

Publius Vergilius Maro

Kesehatan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan manusia dan menjadi dasar bagi pembangunan bidang lainnya. Manusia yang sehat merupakan prasyarat untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Karena itu, investasi sumberdaya manusia di bidang kesehatan harus mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat, dan mesti dilakukan secara berkesinambungan.

Status kesehatan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menjadi lebih produktif, sehingga mempunyai daya saing dalam pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Kesehatan yang rendah tidak akan memberikan sumbangan terhadap produktivitas dan daya saing sebagai pekerja. Jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan, besar kemungkinan penduduk yang produktif menjadi tidak produktif, bahkan menjadi beban. Bahkan beban ini semakin besar, jika yang benar-benar produktif hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, maka akan berdampak pada kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas manusia, merupakan keharusan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih terus

melingkupinya. Bab ini membahas aspek kesehatan terkait dengan permasalahan dan isu strategis di Provinsi Lampung, khususnya dalam konteks kontribusi kesehatan terhadap capaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM untuk kesehatan hanya diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) dikarenakan indikator kesehatan lain lebih sulit untuk diperoleh datanya, namun perlu membahas indikator status kesehatan lainnya dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup. Indikator yang akan dibahas berdasarkan hasil eksplorasi data sekunder (Sensus Penduduk, PODES dan Susenas).

Untuk melihat perkembangan proses pembangunan manusia bidang kesehatan yang telah dicapai, digunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Status Gizi serta angka morbiditas yang mencerminkan derajat kesehatan penduduk Provinsi Lampung.

3.1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup sejak dilahirkan. Tingkat harapan hidup ini sangat dipengaruhi oleh derajat dan kondisi kesehatan. Semakin baik tingkat kesehatan penduduk, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup juga akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Penghitungan angka harapan hidup menggunakan metode tidak langsung, berdasarkan data jumlah anak lahir hidup dan jumlah anak yang masih hidup sebagai input.

Angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung mencapai 70,18 tahun atau berada di urutan ke-13 dari 34 provinsi di Indonesia. Di Pulau Sumatera, angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung di bawah Provinsi Riau (71,19 tahun) dan Jambi (70,89 tahun).

Gambar 3.1 Tren Angka Harapan Hidup Indonesia dan Provinsi Lampung 2014-2018

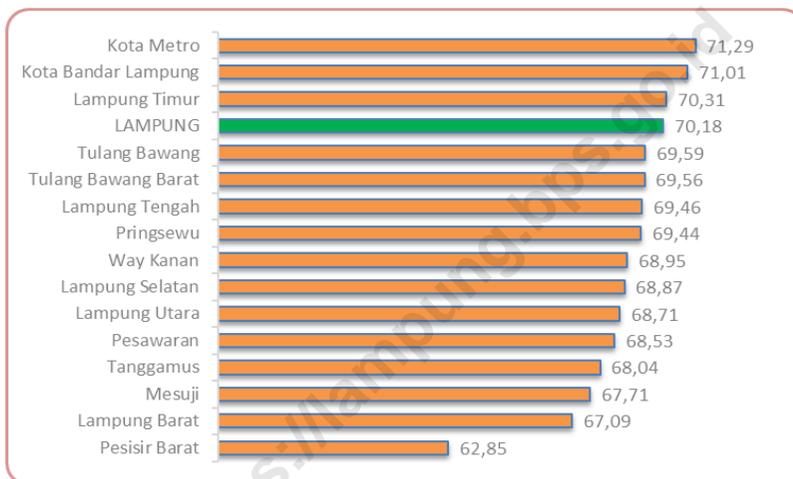


Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama lima tahun terakhir angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung cenderung terus meningkat. Kenaikan ini merefleksikan derajat kesehatan penduduk yang semakin membaik. Tahun 2014, angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung 69,66 tahun naik menjadi 70,18 tahun di tahun 2018, atau telah bertambah 0,52 tahun. Kenaikan ini relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Selama periode tersebut angka harapan hidup penduduk Indonesia mengalami kenaikan 0,61 tahun, yakni dari 70,59 tahun naik menjadi 71,20 tahun. Kenaikan angka harapan hidup yang relatif lebih rendah menyebabkan angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung

masih di bawah penduduk Indonesia. Angka harapan hidup merupakan indikator output yang prosesnya merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan dalam jangka waktu yang lama sehingga kenaikannya secara perlahan-lahan.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Ditinjau menurut kabupaten/kota nampak bahwa angka harapan hidup relatif bervariasi. Terdapat dua kota dan satu kabupaten yang memiliki angka harapan hidup di atas provinsi yakni Kota Metro, Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur masing-masing 71,29 tahun, 71,01 tahun dan 70,31 tahun. Sedangkan angka harapan hidup yang paling rendah ditemui pada penduduk Kabupaten Pesisir Barat. Angka harapan hidup penduduk di kabupaten ini 62,85 tahun atau tertinggal 4,24 tahun dibandingkan Kabupaten Lampung Barat. Angka harapan hidup di Kabupaten Lampung Barat merupakan terendah kedua setelah Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu, angka harapan hidup di kabupaten lainnya relatif bervariasi antara

67,71 tahun (Kabupaten Mesuji) sampai dengan 69,59 tahun (Kabupaten Tulang Bawang).

3.2. Morbiditas

Pengertian morbiditas (kesakitan) adalah kondisi seseorang mengalami sakit saat memiliki keluhan kesehatan yang berakibat mengganggu aktivitas sehari-hari. Seperti tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya secara normal sebagaimana biasanya.

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Keluhan kesehatan mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk yaitu panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya.

Sumber daya manusia yang sehat secara fisik diharapkan menjadi manusia berkualitas sehingga dapat ikut berperan dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya jika penduduk di suatu wilayah sakit hingga mengakibatkan aktivitasnya terganggu maka penduduk di wilayah tersebut tidak dapat ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan. Morbiditas (kesakitan) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk. Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya semakin

rendah morbiditas (kesakitan) menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Selama tiga tahun terakhir persentase penduduk Provinsi Lampung yang mengalami keluhan kesehatan nampak meningkat. Jika pada tahun 2016 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 27,39 persen, kini naik menjadi 30,66 persen di tahun 2018. Namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya sampai menyebabkan kegiatan sehari-hari terganggu. Persentase mereka yang sakit relatif menurun dari tahun sebelumnya. Dari 30,66 persen penduduk yang mengeluhkan kesehatannya, 14,12 persen menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Rata-rata lama sakit yang dialami juga menurun menjadi kurang dari 5 hari.

Tabel 3.1 Indikator Morbiditas Provinsi Lampung, 2016-2018

Indikator Kesehatan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Keluhan kesehatan (%)	27,39	28,52	30,66
Angka kesakitan	14,16	14,45	14,12
Rata-rata lama sakit (hari)	5,66	4,73	4,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2016-2018

Ditinjau menurut kabupaten/kota, angka morbiditas relatif bervariasi. Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (41,31 persen). Dari mereka yang memiliki keluhan kesehatan, 15,25 persennya menderita sakit yang mengganggu kegiatan sehari-hari, dengan lama sakit rata-rata 4,54 hari.

Tabel 3.2 Indikator Morbiditas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018

Kab/Kota	Keluhan Kesehatan (persen)	Angka Kesakitan	Rata-rata lama sakit dlm 1 bulan (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	36,89	16,83	4,01
Tanggamus	29,69	14,45	3,24
Lampung Selatan	28,87	15,03	3,86
Lampung Timur	29,69	14,59	4,00
Lampung Tengah	41,31	15,25	4,54
Lampung Utara	26,42	12,85	4,34
Way Kanan	34,80	16,59	4,08
Tulang Bawang	30,10	12,90	3,23
Pesawaran	26,11	14,90	4,19
Pringsewu	30,65	12,59	4,48
Mesuji	39,91	18,86	5,21
Tulang Bawang Barat	34,34	14,11	4,02
Pesisir Barat	20,14	10,55	3,82
Bandar Lampung	30,04	11,46	5,25
Metro	26,19	10,15	4,51
LAMPUNG	30,66	14,12	4,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2018

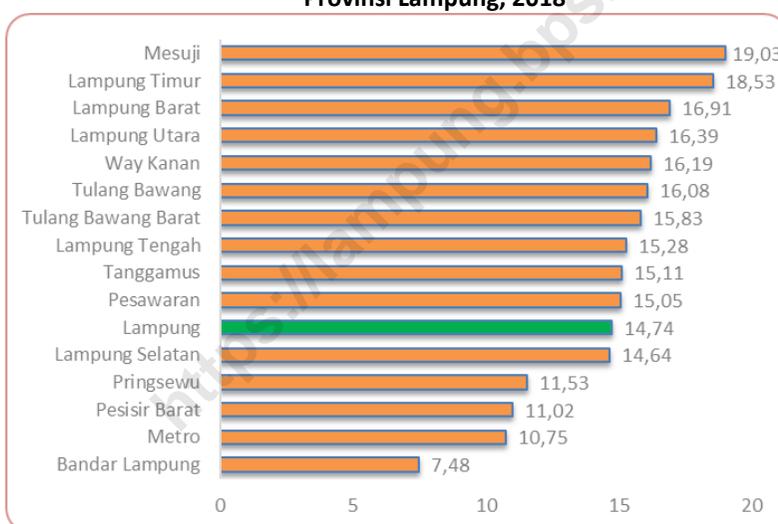
Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Way Kanan merupakan kabupaten yang tingkat morbiditasnya tertinggi, bahkan di atas angka Provinsi Lampung. Rata-rata lama sakit di kabupaten tersebut antara 4-5 hari. Tingkat morbiditas terendah ditemui di Kota Metro, persentase penduduk yang sakit 10,15 persen dan rata-rata lama sakit 4,51 hari.

3.3. Tantangan Pembangunan Manusia Dimensi Kesehatan

Tantangan pembangunan manusia dimensi kesehatan ini fokus pada permasalahan kematian bayi dan anak serta kematian ibu. Tantangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Masih rendahnya usia kawin pertama.** Usia kawin pertama yang relatif rendah merupakan salah satu pemicu meningkatnya resiko kematian bayi. Sebab, pernikahan usia muda dapat meningkatkan resiko perempuan mengalami gangguan pada organ reproduksi. Jika hamil dan melahirkan pada usia yang terlalu muda maka akan meningkatkan resiko terjadi gangguan kehamilan maupun gangguan persalinan.

Gambar 3.3 Persentase Perempuan Usia 10 Tahun ke Atas yang Usia Kawin Pertama Kurang dari 16 Tahun menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2018

Di tahun 2018 tercatat 14,74 persen perempuan usia 10 tahun ke atas dengan usia kawin pertama kurang dari 16 tahun.¹

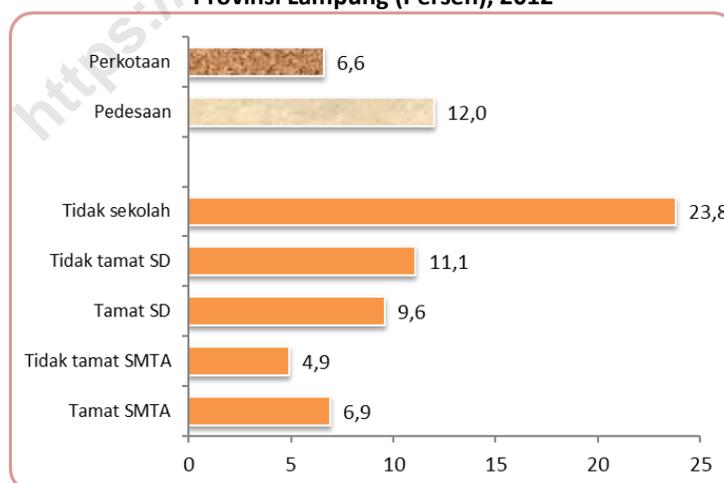
Persentase tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji (19,03 persen),

¹Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Lampung Timur (18,53 persen) dan Lampung Barat (16,91 persen). Sedangkan di Kota Metro dan Bandar Lampung, persentase perempuan usia 10 tahun ke atas yang usia kawin pertama kurang dari 16 tahun terendah.

2. **Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB mendapat pelayanan terutama yang tinggal di pedesaan dan tidak sekolah.** Karena tidak tersedianya data, digunakan data SDKI tahun 2012. Data tersebut memperlihatkan *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* wanita kawin 15-49 tahun di Provinsi Lampung sebesar 70,3 persen atau tertinggi di Indonesia. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (41,2 persen) dan pil (14,4 persen). Pengguna suntik dan pil rawan *drop out* sehingga cepat menurunkan *CPR*.

Gambar 3.4 Kebutuhan Pelayanan KB yang Tidak Terpenuhi di Provinsi Lampung (Persen), 2012



Sumber: BKKBN, Kementerian Kesehatan dan BPS, SDKI 2012

Prevalensi alat kontrasepsi potensial untuk ditingkatkan sebab belum semua PUS yang ingin ber-KB mendapat pelayanan. Di tahun 2012, “*unmeet need*” KB mencapai 7,9 persen atau naik

2,4 poin persen dibandingkan tahun 2007. *Unmeet need* KB PUS yang tinggal di desa dua kali lipat mereka yang tinggal di kota. Sementara *unmeet need* KB PUS yang tidak sekolah mencapai 23,8 persen.

Gambar 3.5 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung (per seribu kelahiran hidup), 2007 dan 2012



Sumber: BKKBN, Kementerian Kesehatan dan BPS, SDKI 2012

- Masih tingginya angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 year*).** Data SDKI menunjukkan *Total Fertility Rate (TFR)* mengalami kenaikan dari 2,5 pada tahun 2007 menjadi 2,7 pada tahun 2012. Artinya wanita di Provinsi Lampung rata-rata memiliki 2,7 anak selama hidupnya. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya *ASFR 15-19* tahun yakni dari 46 menjadi 59 per seribu kelahiran hidup.

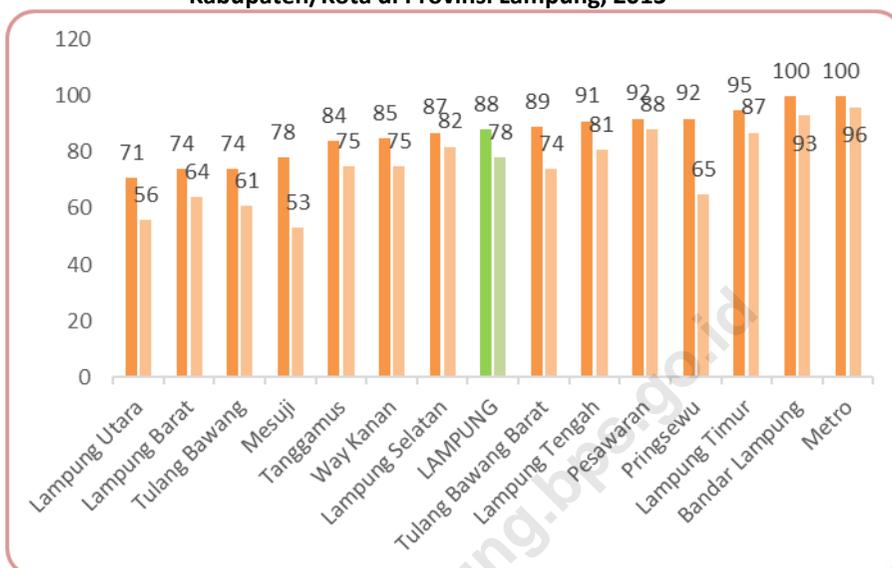
Naiknya kelahiran pada usia yang terlalu muda berpotensi memicu terjadinya kematian ibu.²

4. **Belum optimalnya pemeriksaan selama kehamilan.**³ Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan bisa tercermin dari kondisi kesehatan ibu dan anak terutama di masa kehamilan. Kesehatan ibu di masa kehamilan serta kesehatan bayi di dalam kandungan perlu diperhatikan dengan baik. Pemeriksaan kehamilan hingga persalinan merupakan proses penting untuk mendapatkan calon penerus bangsa yang baik dan berkualitas. Kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur akan mengurangi kematian ibu dan anak yang selama ini terjadi. Begitu juga setelah melahirkan, proses tumbuh kembang anak juga penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak. Penyuluhan terhadap calon ibu yang sedang hamil perlu diberikan agar perkembangan kondisi bayi dapat dipantau dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelainan pada bayi semasa kehamilan. Ada baiknya pemeriksaan kehamilan dilakukan secara teratur dan disarankan paling tidak 4 kali hingga sebelum persalinan.

²Empat kondisi kehamilan yang tidak ideal yang disebut '4 terlalu' adalah: 1) Kehamilan terlalu muda (kurang dari 18 tahun), 2) Usia yang terlalu tua untuk hamil (di atas 34 tahun), 3) Jarak kehamilan terlalu dekat (kurang dari 2 tahun), dan 4) Kehamilan terlalu banyak (lebih dari 3 anak).

³*Antenatal Care* (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya dan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan/SPK (Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Kemkes RI, 2010). Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, bidan dan perawat.

Gambar 3.6 Cakupan Indikator ANC K1 dan ANC Minimal 4 Kali menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2013



Ket.

- 1)K1 ideal adalah proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil pertama kali pada trimester 1.
- 2)ANC minimal 4 kali adalah proporsi kelahiran yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil minimal 4 kali tanpa memperhitungkan periode waktu pemeriksaan.

Sumber: Kementerian Kesehatan, Riset Kesehatan Dasar 2013

“Untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi seharusnya setiap puskesmas memiliki alat USG dan tenaga kesehatan yang kompeten termasuk adanya pilot project pemeriksaan terpadu di setiap puskesmas.”

(Peserta FGD, Kab. Lampung Selatan)

Indikator K1 ideal dan K4 yang merujuk pada frekuensi dan periode trimester saat dilakukan ANC menunjukkan

keberlangsungan pemeriksaan kesehatan semasa hamil. Setiap ibu hamil yang menerima ANC pada trimester 1 (K1 ideal) seharusnya mendapat pelayanan secara berkelanjutan dari

trimester 1 hingga trimester 3. Hal ini dapat dilihat dari indikator ANC K4. Cakupan K1 ideal di Provinsi Lampung adalah 88 persen dengan cakupan terendah di Lampung Utara (71 persen) serta tertinggi di Bandar Lampung dan Metro (100 persen). Cakupan K4 di Provinsi Lampung adalah 78 persen dengan cakupan terendah adalah Mesuji (53 persen) dan tertinggi di Kota Metro (96 persen). Berdasarkan penjelasan di atas, selisih dari cakupan K1 ideal dan K4 memperlihatkan bahwa terdapat 10 persen dari ibu yang menerima K1 ideal tidak melanjutkan ANC sesuai standar minimal (K4).

Pemeriksaan USG kehamilan disarankan untuk dilakukan agar perkembangan janin dapat terus dipantau. Dengan USG 2D, 3D, ataupun 4D, dapat dideteksi kelainan yang mungkin terjadi pada calon jabang bayi. Banyak yang didapat dari pemeriksaan USG, misalnya menentukan usia kehamilan, melihat kondisi kehamilan termasuk kelainan janin. Idealnya pemeriksaan USG dilakukan tiga kali selama masa kehamilan.

Pemeriksaan USG penting dilakukan saat usia kehamilan di bawah 12 minggu untuk mendeteksi ada tidaknya kehamilan. Kemudian pada trimester kedua saat usia kehamilan 18-20 minggu, bermanfaat untuk mendeteksi kecacatan pada janin. Pada trimester akhir saat usia kandungan 34-36 minggu USG berguna dalam menentukan posisi janin serta letak plasenta sehingga dapat menentukan proses persalinannya.

5. **Masih kurangnya pengetahuan terkait kesehatan ibu dan balita.** Dari hasil *FGD* diperoleh informasi sebagai berikut:

“Penyebab kematian bayi terutama karena pengetahuan dari orang tua yang kurang untuk mendeteksi gejala awal panas, dehidrasi dan diare. Orang tua kadang menyepelekan, gejala awal penyakit tidak diperhatikan. Anak hanya anggap tubuhnya hangat, padahal suhu 37,5 derajat sudah harus diturunkan panasnya.” (Peserta *FGD*, Kab. Tanggamus)

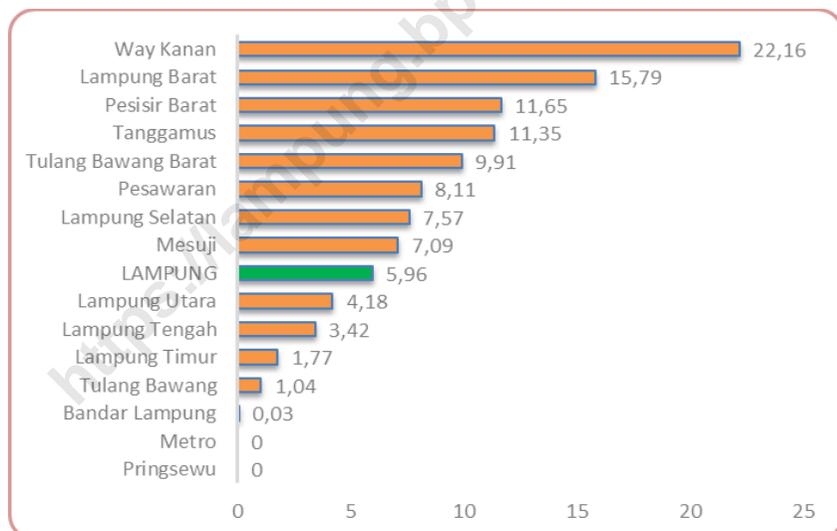
“Makanan yang sehat itu ASI Eksklusif yang memiliki manfaat daya tahan tubuh bagi si bayi. Pada kenyataan di lapangan, terkadang pada orang tua bukannya memberi ASI, tetapi susu formula, madu, atau air tajin. Seharusnya diberikan ASI. Jika diberikan yang lain maka bayi akan mudah terpapar penyakit.” (Peserta *FGD*, Kab. Lampung Tengah)

“Tenaga kesehatan sudah melakukan kunjungan nifas 3 kali, yaitu 0-3 hari, 3-7 hari, dan 8-40 hari. Hal ini harus dilakukan oleh bidan desa. Namun, masih banyak masyarakat tidak mengerti tentang resiko kejang saat nifas.” (Peserta *FGD*, Kab. Lampung Timur)

6. **Masih tingginya penolong persalinan yang ditangani non tenaga medis.** *World Health Organization* (WHO) dalam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2012) memperkirakan bahwa sekitar 15-20 persen ibu hamil, baik di negara maju maupun berkembang akan mengalami risiko tinggi (risti) dan/atau komplikasi. Salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Data Susenas 2018 memperlihatkan persentase penolong persalinan yang ditangani tenaga medis (dokter, bidan dan paramedis) mencapai 94,04 persen. Artinya, masih ada 5,96 persen penolong persalinan yang ditangani non tenaga medis (dukun bersalin, famili/keluarga dan lainnya). Kabupaten yang persentase penolong persalinan yang ditangani dukun bersalin tertinggi adalah Way Kanan, Lampung Barat dan Pesisir Barat.

Gambar 3.7 Persentase Penolong Kelahiran Terakhir yang Ditangani Non Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2018

- 7. Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan terutama rumah sakit.** Puskesmas/pustu merupakan fasilitas kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat di Provinsi Lampung.

Gambar 3.8 Persentase Desa yang Mudah Mengakses Puskesmas menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusa Statistik, Potensi Desa 2018

Meskipun demikian, data PODES 2018 memperlihatkan masih ada desa yang relatif sulit menjangkau puskesmas disebabkan akses jalan menuju puskesmas yang relatif sulit. Kondisi ini terutama terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Way Kanan dan Mesuji. Persentase desa yang sulit untuk menjangkau puskesmas lebih dari 10 persen.

Selain itu, terkait dengan keberadaan rumah sakit, dari data PODES 2018, beberapa desa masih ada yang merasakan sulit menjangkau fasilitas tersebut. Kondisi ini terlihat dari porsi desa yang mengaku sulit

“Penanganan di RSUD Sukadana terhadap bayi yang sakit sebenarnya sudah cukup baik. Masalahnya adalah transportasi/infrastruktur untuk ke RSUD Sukadana yang belum baik.” (Peserta FGD, Kab. Lampung Timur)

mengakses rumah sakit. Hal ini terutama dirasakan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Barat dan Way Kanan, dengan persentase desa lebih dari 11 persen. Kesulitan ini disebabkan keberadaan rumah sakit yang biasanya hanya tersedia di ibukota kabupaten.

Gambar 3.9 Persentase Desa yang Sulit Menjangkau Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2018

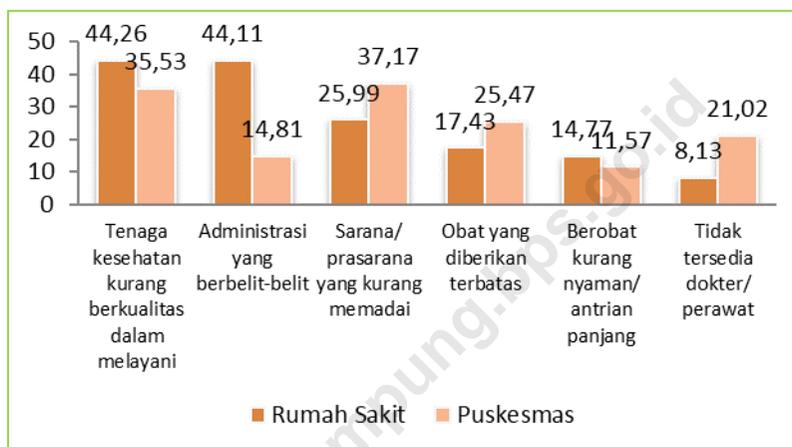


Sumber: BPS Provinsi Lampung, Podes 2018

8. **Terbatasnya sarana/prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas di rumah sakit dan puskesmas.** Dari hasil Survei Harapan Masyarakat 2015 ditunjukkan bahwa 37,17 persen responden memiliki persepsi bahwa sarana/prasarana di puskesmas masih belum memadai. Sedangkan responden yang menganggap bahwa tenaga kesehatan masih kurang berkualitas dalam melayani mencapai 35,53 persen. Persentase responden yang mempunyai persepsi sarana/prasarana di rumah sakit

masih belum memadai mencapai 25,99 persen. Sedangkan persentase responden yang memiliki persepsi tenaga kesehatan kurang berkualitas mencapai 44,26 persen.

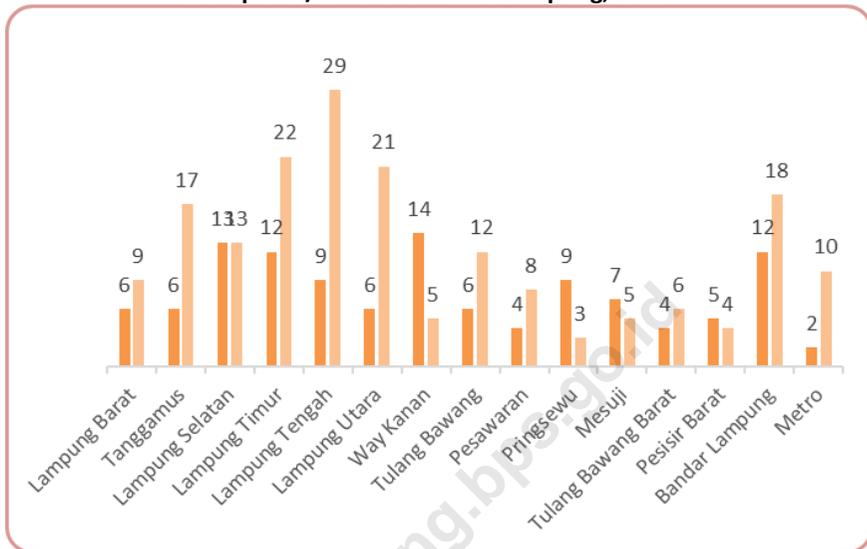
Gambar 3.10 Persepsi Masyarakat Menurut Jenis Permasalahan di Rumah Sakit dan Puskesmas Provinsi Lampung (Persen), 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Survei Harapan Masyarakat 2015

Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan puskesmas perlu didorong menjadi puskesmas rawat inap. Data Pendataan Puskesmas 2017 (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung) memperlihatkan jumlah puskesmas di Provinsi Lampung sebanyak 297 puskesmas. Dari jumlah tersebut, 115 puskesmas berstatus puskesmas rawat inap. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang letaknya strategis dan mudah diakses dari puskesmas di sekitarnya, dapat dijangkau melalui sarana transportasi, yang didirikan sesuai dengan analisa kebutuhan kabupaten/kota, dilengkapi fasilitas rawat inap, peralatan medis dan kesehatan serta sarana prasarana yang sesuai standar (Kementerian Kesehatan, 2013c).

Gambar 3.11 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2017



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Puskesmas rawat inap tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).⁴ Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (Kementerian Kesehatan, 2013c). Jarak tempuh dari lokasi pemukiman sasaran, pelayanan dasar dan Puskesmas non PONED ke Puskesmas mampu PONED paling lama 1 jam dengan transportasi umum mengingat waktu paling lama untuk

⁴Menurut *the International Federal on of Gynecology Obstetrics* (FIGO) terdapat 4 pintu untuk keluar dari kematian Ibu yaitu: 1) status perempuan dan kesetaraan gender; 2) Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; 3) persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga yang kompeten 4) PONED-PONEK.

mengatasi perdarahan 2 jam dan jarak tempuh Puskesmas mampu PONEC ke rumah sakit minimal 2 jam.

9. **Terbatasnya dokter spesialis.** Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tercatat jumlah dokter spesialis sebanyak 603 orang yang bertugas di rumah sakit se-kabupaten kota di Provinsi Lampung (BPS Provinsi Lampung, Lampung Dalam Angka 2015). Tetapi, persebaran dokter spesialis di kabupaten/kota relatif belum merata. Dari hasil *FGD* diperoleh informasi sebagai berikut:

- Di RSUD Liwa (Kabupaten Lampung Barat) hanya ada 1 tenaga dokter spesialis.
- Di RSUD Sukadana (Kabupaten Lampung Timur) tidak bisa melakukan operasi/bedah karena tidak adanya dokter anestesi, padahal sudah ada dokter bedahnya. Jika akan dilakukan operasi selalu dirujuk ke RSUD Ahmad Yani (Kota Metro) atau RSUD Abdul Moeloek (Kota Bandar Lampung). Dokter yang dari luar Lampung menganggap wilayah Lampung Timur masih terkesan rawan (kurang nyaman untuk tinggal).
- Kabupaten Way Kanan belum ada dokter spesialis anak.
- Di RSUD Ahmad Yani tidak memiliki dokter spesialis jantung, sehingga harus dirujuk ke RSUD Abdul Moeloek agar tidak memperburuk kondisi pasien.
- Dalam hal fasilitas dan sumber daya manusia, dokter jantung anak-anak belum ada di Provinsi Lampung, sehingga harus dirujuk ke Jakarta. Selama ini yang ada hanya dokter jantung untuk orang dewasa.

10. **Masih kurangnya *skill* bidan terutama tindakan kegawat darurat.** Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi (a) Pelayanan kesehatan ibu, (b) Pelayanan kesehatan anak dan (c) Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010, Pasal 9). Terkait dengan pelayanan kesehatan ibu termasuk penanganan kegawat darurat dilanjutkan dengan perujukan. Keterlambatan dalam penanganan kegawat darurat beresiko terhadap kematian ibu.
- Bidan yang baru menyelesaikan pendidikannya belum berpengalaman dalam menangani persalinan. Selama bersekolah tiga tahun belum tentu sempat menolong persalinan apalagi menangani kegawat darurat. Termasuk pada saat praktek belum tentu dokter mau kasih uji coba pasiennya. Teorinya sudah dikuasai tapi prakteknya masih minim. Kompetensi inilah yang perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan (*capacity building*).
11. **Terbatasnya jumlah tenaga tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian di puskesmas.⁵**

⁵Tenaga kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas selain dokter, dokter gigi, perawat dan bidan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, pasal 16 ayat 3).

Dari hasil *FGD* di Kabupaten Tanggamus diperoleh informasi tenaga kesehatan yang masih kurang meliputi tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, tenaga kesehatan keliling, tenaga laboratorium, tenaga farmasi dan dokter. Tenaga gizi diperlukan untuk memberikan penyuluhan mengenai masalah nutrisi.

Solusi sementara bidan dijadikan tenaga ahli gizi sehingga kurang optimal karena bukan ahlinya.

Tenaga laboratorium belum ada di semua puskesmas. Padahal dibutuhkan untuk pemeriksaan ibu hamil

serta mendeteksi penyakit secara dini.

*“Pendistribusian tenaga analis kesehatan tidak merata sehingga tidak semua puskesmas ada tenaga analis. Hal tersebut karena banyak tenaga kesehatan yang diterima memilih untuk pindah ke Bandar Lampung atau Natar”
(Peserta FGD, Kab. Lampung Selatan)*

12. **Belum optimalnya sosialisasi BPJS terutama bagi penduduk miskin.** Dari hasil *FGD* diperoleh informasi sebagai berikut:

“Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat BPJS. Mereka merasa BPJS bukannya membantu malah tidak terlayani. Masih diperlukan penyuluhan-penyuluhan dari posyandu, karena seringkali informasi tidak sampai ke masyarakat.” (Peserta *FGD*, Kab. Lampung Utara)

“Prosedur pengurusan BPJS membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang tidak mudah.” (Peserta *FGD*, Kab. Lampung Selatan)

“Untuk pembuatan kartu BPJS itu mudah. Kebanyakan peserta masih kurang sadar dalam pembuatan kartu, biasanya sakit terlebih dahulu baru membuat kartunya.” (Peserta FGD, Kab. Pesawaran)

“Permasalahan di masyarakat lain yang terjadi yakni adanya masyarakat miskin yang tidak mempunyai KTP sehingga terkendala birokrasi saat akan mengurus BPJS.” (Peserta FGD, Kab. Lampung Timur)

“Ada masyarakat yang miskin tidak mau daftar BPJS daerah tetapi dari pusat tidak terdaftar. Terkadang masyarakat itu tidak mau yang ribet, mereka maunya yang gratis dan dapat fasilitas yang bagus.” (Peserta FGD, Kab. Way Kanan)

“Sebagai tambahan informasi bagi yang beranggapan birokrasi BPJS untuk bayi ribet, kartu BPJS bisa dibuat sebelum bayi dilahirkan (banyak yang belum tahu).”⁶ (Peserta FGD, Kab. Lampung Timur)

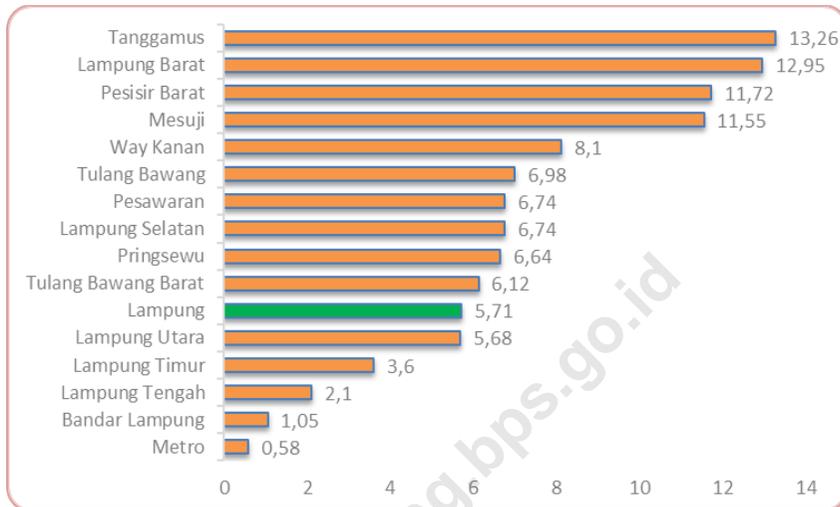
13. **Masih tingginya prevalensi gizi buruk pada balita.** Data dan Informasi Profil Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2018 menunjukkan prevalensi gizi buruk-kurang pada anak balita sebesar 18,50 persen (mendekati prevalensi tinggi). Prevalensi balita pendek mencapai 31,60 persen yang artinya termasuk kategori serius. Prevalensi kurus pada anak balita masih 9,30

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015, Pasal 11b Ayat 5: *“Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan.”*

persen, yang artinya masalah kurus di Provinsi Lampung masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius.

14. **Masih tingginya kondisi rumah yang berlantai tanah.** Data Susenas 2018 memperlihatkan persentase rumah tangga yang jenis lantai rumahnya tanah sebesar 5,71 persen. Kabupaten yang memiliki persentase rumah tangga berlantai tanah terbanyak adalah Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Mesuji. Sementara persentase terendah ditemui di Kota Metro dan Bandar Lampung. Lantai rumah dapat mempengaruhi terjadinya penyakit ISPA karena lantai yang tidak memenuhi standar merupakan media yang baik untuk perkembangbiakan bakteri atau virus penyebab ISPA. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto dkk (2000) bahwa jenis lantai setengah plester dan tanah akan banyak mempengaruhi kelembaban rumah, kondisi rumah yang lembab dan susah dibersihkan merupakan tempat berkembang biak mikroorganisme pathogen termasuk kuman ISPA.

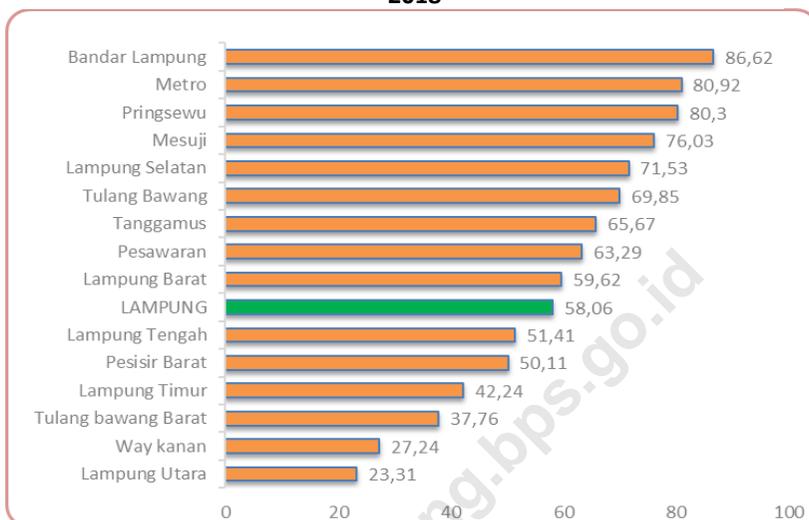
Gambar 3.12 Persentase Rumah Tangga yang Jenis Lantai Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2018

15. **Masih rendahnya akses terhadap air minum bersih.** Data Susenas 2018 menunjukkan persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih sebesar 58,06 persen. Kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga pengguna air minum bersih tertinggi adalah Kota Bandar Lampung (86,62 persen) dan Metro (80,92 persen). Sementara persentase rumah tangga menggunakan air minum bersih yang terendah ditemui di Kabupaten Lampung Utara.

Gambar 3.13 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2018



Ket.

- 1) Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tangki septik \geq 10 meter.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2018

Tantangan Utama Dalam Pencapaian Sasaran Pendidikan

4

“Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan, merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian”

Ki Hajar Dewantara

Sejarah mencatat bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan negara-negara maju. Pendidikan menjadi sebuah tolok ukur suatu daerah dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing secara global. Karena itu, tidaklah mengherankan hampir semua negara menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional mereka (Syamsudin, 2009). Sejumlah sumber menyebutkan negara Finlandia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.

Pendidikan dan sosial budaya sangat berkaitan erat dimana sistem sosial budaya menjadi bagian dari sistem pendidikan itu sendiri, sehingga permasalahan pendidikan menjadi sangat kompleks. Misalnya masalah mutu pendidikan dan manusia yang ada tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid tersebut berasal, serta masih banyak faktor-faktor lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk menjawab tantangan dunia pendidikan juga menjadi sangat kompleks, menyangkut banyak komponen, serta melibatkan banyak pihak yang

terkait agar masalah pendidikan tersebut dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan manusia berkualitas, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan, ekonomi rumah tangga, kualitas pendidikan, terbatasnya sekolah kejuruan, dan lain lain.

Desakan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut makin dirasakan setelah bangsa Indonesia mengikatkan diri melalui komitmen *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Berbeda dengan MDGs, program SDGs menaruh perhatian bukan hanya pada pengembangan manusia (*human development*) tapi juga pengembangan ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari agendanya. SDGs bertujuan memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

Pasal 31 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat .

Selanjutnya pada bab ini akan membahas tentang pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung berdasar hasil studi, survei, dan analisisnya, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis akan disajikan untuk menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan yaitu angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, pembiayaan pendidikan, sarana, tenaga pendidikan, dan lainnya. Telaah yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih jauh, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya. Memperluas akses ke pendidikan menengah tidak hanya berpengaruh terhadap tekanan sosial, tetapi ekonomi manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak.

4.1. Pencapaian Partisipasi Pendidikan Dasar Menggembirakan

Pemerintah mempunyai program Wajib Belajar 9 tahun. Program ini didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaidah-

kaidah yang tercantum dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Prayitno, 2000). Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Kelompok umur yang dipakai untuk melihat angka partisipasi sekolah adalah kelompok umur yang ditujukan untuk program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yaitu umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Indikator lainnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah berpartisipasi dalam pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan umurnya .

Pada Tabel 4.1 terlihat capaian angka partisipasi sekolah pada kelompok umur SD dan SMP relatif sudah baik. Pada tahun 2018, APS kelompok umur 7-12 tahun mencapai 99,86 persen dan APS 13-15 sebesar 95,00 persen. Angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA dan sederajat usia 16-18 tahun sebesar 70,83 persen, yang berarti masih ada sekitar 30 persen yang belum sekolah atau sudah bersekolah namun berhenti mengenyam pendidikan tingkat SMA. Sedangkan untuk APM SD di tahun 2018 mencapai 99 persen, yang berarti dari 100 penduduk usia 7-12 tahun ada sekitar 99 orang yang bersekolah

di bangku SD/ sederajat. Pada jenjang yang lebih tinggi, sekitar 80 orang dari 100 penduduk usia 13-15 tahun menerima pendidikan di bangku SLTP/ sederajat, dan sekitar 59 orang dari 100 penduduk usia 16-18 tahun mendapatkan pendidikan di bangku SLTA/ sederajat. Pola di atas menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi APS dan APM di Provinsi Lampung semakin menurun.

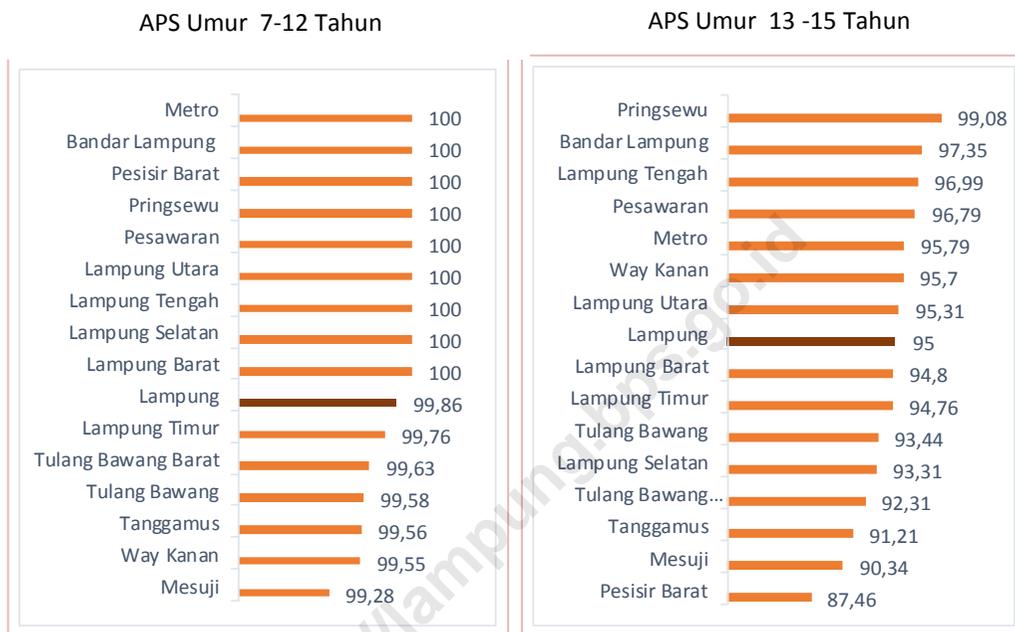
Tabel 4.1 APS dan APM Menurut Kelompok Umur di Provinsi Lampung, 2016-2018

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Sekolah			
SD	99,63	99,78	99,86
SLTP	94,32	94,76	95,00
SLTA	69,31	70,03	70,83
Angka Partisipasi Murni			
SD	98,46	99,02	99,21
SLTP	78,34	79,24	80,23
SLTA	58,85	58,97	59,18

Sumber: BPS, Susenas 2016-2018

Pada tingkat sekolah dasar, partisipasi sekolah di semua wilayah di Provinsi Lampung hampir merata lebih dari 99 persen. APS pada usia 7-12 tahun yang sudah mencapai 100 persen berada di Kota Metro dan Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Pada jenjang SMP atau umur 13-15 tahun APS sekolah masih relatif tinggi dan merata di seluruh daerah. Namun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan seperti di jenjang SMA/ sederajat ke atas, APS cenderung menurun.

Gambar 4.1 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2018



Fenomena ini terjadi di semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. APS kabupaten/kota berkisar antara 61-77 persen, dimana persentase terendah di temui di Kabupaten Mesuji. Untuk daerah kota, APS relatif lebih tinggi di Kota Metro mencapai 83 persen sementara di Kota Bandar Lampung sebesar 74,9 persen.

4.2. Tantangan Pembangunan Manusia Dimensi Pendidikan

Banyak hal lain yang menjadi penyebab atau mempengaruhi anak berhenti sekolah khususnya pada umur 16-18 tahun di Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan pendidikan khususnya kasus anak berhenti sekolah ini, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil pengamatan eksplorasi data, *Indepth study* (studi mendalam), dan *Focus Group Discussion* (FGD), dapat teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Beberapa faktor tersebut antara lain ketidakmampuan ekonomi rumah tangga, aksesibilitas sarana pendidikan, pendidikan orang tua, kualitas guru, dan lainnya.

1. Ketidakmampuan Ekonomi Rumah Tangga

Beberapa kasus putus sekolah yang terungkap dalam *indepth study* disebabkan oleh faktor ekonomi rumah tangga yang kurang baik. Faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan keluarga untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah. Bagi sebagian rumah tangga, biaya sekolah

masih merupakan beban yang sulit untuk dipikul meski telah ada dana BOS.

Bahkan kasus putus sekolah bisa terjadi hanya karena ketidakmampuan memperoleh biaya transport beberapa ribu rupiah setiap hari. Tentu disayangkan apabila seorang anak yang masih bersemangat untuk bersekolah tidak dapat melanjutkan sekolahnya hanya karena masalah biaya transport ke sekolah yang nilainya tidak seberapa. Ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah akan berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani (putus sekolah).

Kasus yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat wawancara mendalam, salah seorang anak laki-laki gagal melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, kemudian lebih memilih untuk bekerja membantu orangtua yang ekonominya terpuruk. Responden lainnya menjawab tidak ada biaya untuk membeli perlengkapan sekolah dan akhirnya putus sekolah saat kenaikan kelas 4 SD. Ada juga responden yang merasa kesulitan membagi waktu, karena dengan

membantu orang tua membuat siswa tersebut sering telat dan tidak masuk sekolah, akhirnya putus sekolah saat kenaikan kelas 2 SMP (Responden, Tulang Bawang Barat, 2015).

“bahwa faktor penyebab utama putus sekolah adalah biaya padahal sudah ada dana BOS, tapi pada kenyataannya ada biaya lain yang lebih banyak yang tidak ditanggung dana BOS. Contohnya biaya seragam, buku, dan lain-lain”. Peserta (FGD) dari Kabupaten Tulang Bawang,

Kasus serupa terjadi di Kabupaten Pesawaran. Ditemukan kasus anak putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan si anak (pendidikan SMA) dan dua orang adiknya yang masih duduk di tingkat SD dan SLTP. Biaya sekolah sejak kelas I SMA sudah menunggak hingga hampir 4 juta dan orang tua si anak belum mampu membayar biaya sekolah anaknya. Sekolah sudah menagih, hingga si anak memutuskan berhenti sekolah. Padahal si anak menunjukkan semangat ingin melanjutkan sekolah, dan keluarga mendukungnya. Sedangkan pihak sekolah tidak ada perhatian, apalagi upaya untuk menolong (Responden, Pesawaran, 2015).

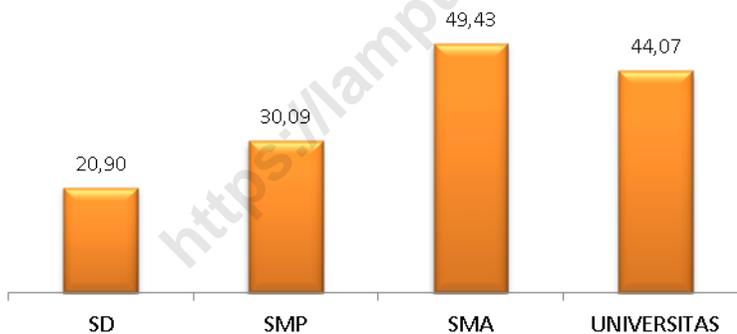
Karena adanya tekanan ekonomi sebagian anak-anak sekolah terpaksa meninggalkan bangku pendidikan untuk membantu penghasilan orang tuanya. Dari hasil wawancara mendalam, ditemukan beberapa kasus anak putus sekolah yang disebabkan anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya (Responden, Pesisir Barat; Pringsewu; Bandar Lampung, 2015).

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu peserta hasil wawancara mendalam di Kabupaten Lampung Barat pun terkait masalah ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terhentinya anak untuk sekolah, misalnya ongkos ojek pulang pergi ke sekolah yang cukup mahal karena belum ada transportasi umum seperti angkutan desa sehingga orang tua tidak sanggup menanggung biaya tersebut.

Serupa seperti hasil dari Susenas bahwa hasil wawancara dalam Survei Harapan Masyarakat Provinsi Lampung 2015 (SHM 2015), yang dilakukan oleh BPS Provinsi Lampung diketahui bahwa biaya

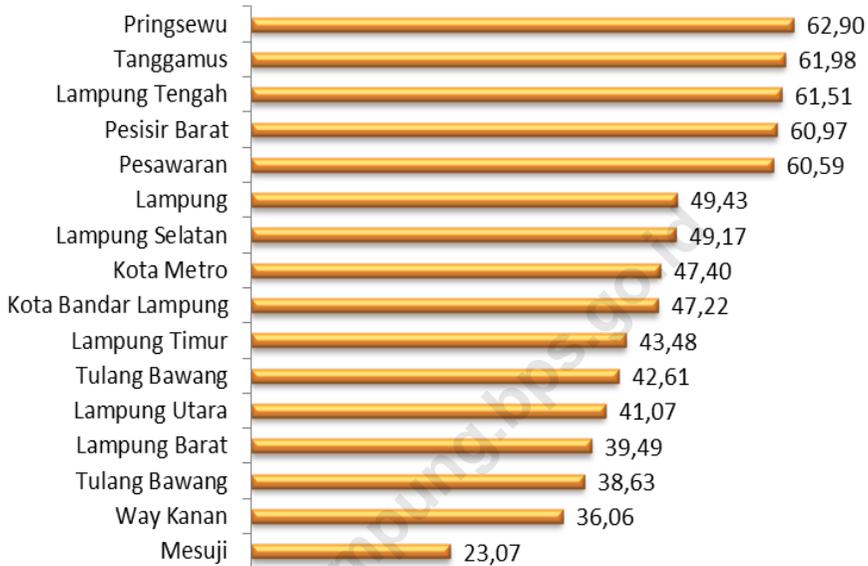
pendidikan masih menjadi faktor utama yang memberatkan masyarakat dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Gambar 4.4 memperlihatkan betapa biaya sekolah tingkat pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas (SLTA/ sederajat) yang terasa cukup memberatkan. Persentase masyarakat yang menyatakan biaya pendidikan di sekolah lanjutan atas (SMU/ sederajat) memberatkan sekitar 49,43 persen. Dan Gambar 4.5 menggambarkan distribusi persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa biaya pada jenjang SLTA cukup memberatkan.

Gambar 4.2 Persepsi Masyarakat yang Menyatakan Biaya Sekolah Memberatkan menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung (Persen), 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, SHM, 2015

Gambar 4.3 Persepsi Masyarakat yang Menyatakan Biaya Sekolah SLTA/ sederajat Memberatkan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, SHM, 2015

2. Masih Adanya Kesulitan Aksesibilitas Dunia Pendidikan

Faktor akses ke fasilitas sekolah akan menjadi faktor penghambat bagi siswa, jika jarak yang ditempuh terlalu jauh. Data Podes 2018 menunjukkan bahwa keberadaan SD di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung sudah relatif merata dan terjangkau oleh masyarakat. Hal yang sama untuk fasilitas pendidikan SMP/ sederajat, sudah relatif sedikit desa yang jaraknya jauh dari SMP sehingga cukup terjangkau keberadaannya.

Tabel 4.2 Jarak Desa dengan Fasilitas Pendidikan SD, SMP, SLTA dan SMK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (Persen), 2018

Kabupaten/Kota	Desa dgn jarak SD terdekat > 10 km	Desa dgn jarak SMP terdekat > 10 km	Desa dgn jarak SLTA terdekat > 10 km	Desa dgn jarak SMK terdekat > 10 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	0,00	0,74	7,35	41,18
Tanggamus	0,00	0,00	4,97	26,16
Lampung Selatan	0,00	0,77	7,31	16,54
Lampung Timur	0,00	0,00	6,82	9,85
Lampung Tengah	0,00	0,00	5,41	9,24
Lampung Utara	0,00	1,62	11,74	47,77
Way Kanan	0,00	1,76	14,54	29,96
Tulang Bawang	0,00	1,32	23,18	20,53
Pesawaran	0,00	0,68	3,38	23,65
Pringsewu	0,00	0,00	5,34	6,87
Mesuji	0,00	0,00	9,52	18,10
Tulang Bawang Barat	0,00	0,00	9,71	21,36
Pesisir Barat	0,00	0,00	15,25	65,25
Kota Bandar Lampung	0,00	0,00	1,59	0,79
Kota Metro	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMPUNG	0,00	0,53	8,59	23,10

Sumber : BPS, Podes 2018

Pada tingkat SLTA/ sederajat keberadaan sekolah lebih terbatas jumlahnya sehingga keterjangkauan masyarakat mengakses pelayanan juga menjadi terbatas. Cukup banyak desa yang posisinya dengan sekolah cukup jauh. Pada jenjang SLTA/ sederajat persentase desa di Provinsi Lampung lebih dari 10 Km dari kantor desa sebanyak 8,59 persen. Desa-desa tersebut utamanya berada di Kabupaten Tulang Bawang, Pesisir Barat, Way Kanan dan Lampung Utara. Demikian halnya SMK, keberadaannya bahkan lebih kurang terjangkau oleh

masyarakat sekitarnya. Hal ini terutama masih ditemui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Utara dan Lampung Barat.

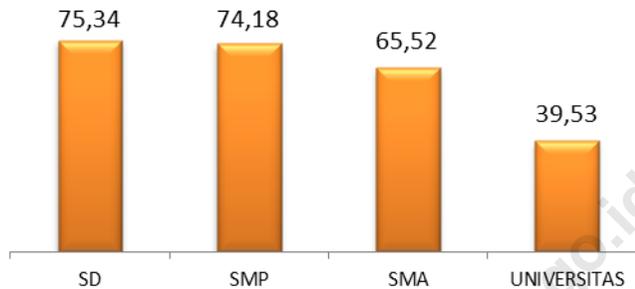
3. Kualitas Tenaga Pengajar Belum Optimal

Kualitas tenaga pengajar memegang peranan penting dalam mempertahankan anak untuk tetap sekolah. Dalam hasil *indepth study* dan FGD diperoleh informasi bahwa dalam beberapa kasus putus sekolah yang menjadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan guru, sehingga ada ketidaknyamanan anak di sekolah.

Hasil temuan *indepth interview* lainnya terdapat kasus anak yang putus sekolah karena merasa malu yang disebabkan anak tidak naik kelas, keterbatasan mental dan fisik, sering dimarahi guru, dan sebagainya. (Responden, Lampung Tengah; Lampung Barat, 2015). Selanjutnya, berdasarkan SHM 2015 masih ada masyarakat yang merasa fasilitas pendidikan yang ada kurang berkualitas, seperti disajikan pada Gambar 4.7.

“Permasalahan ketidaknyamanan anak di sekolah ini seharusnya tidak terjadi, jika ada komunikasi yang intens antara murid dan guru, dimana ada anak merasa dikucilkan dalam lingkungan sekolah oleh teman-temannya (Informan, Lampung Selatan, 2015).”

Gambar 4.4 Persepsi Masyarakat terhadap Fasilitas Pendidikan Cukup Berkualitas menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung (Persen), 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, SHM, 2015

Gambar 3.7 menggambarkan bahwa kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat) dan jenjang pendidikan pada menengah pertama (SMP/ sederajat) di Provinsi Lampung sudah diatas 70 persen, lebih baik dibandingkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas yang baru mencapai 65,52 persen terlebih jika dibandingkan dengan tingkat universitas, hanya 39,53 persen masyarakat yang memberi respon cukup berkualitas.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ialah segala sesuatu yang terjadi di sekitar anak-anak sekolah baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut semua dapat mempengaruhi perkembangan anak didik. Dalam lingkungan keluarga tempat dimana pengaruh orang tua dapat bertindak sebagai motivator bagi anak untuk sekolah, dan orang tua harus tahu dan mengerti apa yang terjadi di sekolah pada anaknya. Ikatan antara pihak sekolah dan orang tua harus dibangun agar terjalin hubungan

yang baik. Seperti beberapa kasus di beberapa kabupaten bahwa seorang anak dari rumah izin bersekolah namun tidak sampai sekolah ternyata mereka mampir di tempat-tempat rental/permainan game, hal ini terjadi terus-menerus dan akhirnya membuat mereka malas untuk pergi sekolah. Menurut salah satu nara sumber dari FGD yang menyatakan bahwa seharusnya ada pengawasan dari pihak terkait terhadap izin usaha hiburan.

5. Faktor Sosial Budaya

Selain faktor-faktor di atas ada faktor lain yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu: faktor sosial budaya juga yang menyebabkan anak enggan melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Masyarakat di perdesaan memiliki kebiasaan yang dapat menghambat pendidikan misalnya anak perempuan yang tamat SMP tidak melanjutkan ke SMA tapi mereka menikah, untuk anak laki-laki jika mereka sudah dirasa mampu bertani dan beternak maka mereka umumnya berorientasi menikah. Seperti diungkapkan salah satu sumber FDG di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung bahwa masyarakat setempat memiliki budaya yang aneh “bahwa mereka tidak mampu menyekolahkan anak tapi bisa mengadakan pesta yang cukup meriah dan mewah”.

6. Kurangnya Perhatian Orang Tua

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan kurangnya komunikasi dengan anak mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas, karena tidak ada yang melarangnya untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan penyimpangan sosial seperti hamil

di luar nikah. Pergaulan bebas dewasa ini dikalangan remaja terutama diusia sekolah perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan dan bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya anak tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang melanggar norma-norma sosial dan keagamaan. Biasanya di usia remaja teman lebih penting dan lebih dicari dari pada keluarga. Remaja belum dapat dikatakan dewasa tetapi juga bukan anak-anak, sehingga pemikiran remaja tersebut masih labil dan mudah terpengaruh kedalam pergaulan bebas.

Peran orang tua sangat penting dalam memotivasi anak agar dia dapat bersekolah ke jenjang sekolah berikutnya. Salah seorang pelajar perempuan terpaksa menikah karena pihak lelaki tidak mau menunggu lama, setelah berhenti sekolah selama satu bulan langsung melaksanakan pernikahan (Responden, Tulang Bawang).

7. Penyalahgunaan Teknologi

Mudahnya mengakses informasi dari media elektronik maupun media cetak ini memicu para remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang banyak hal, termasuk hal-hal yang bersifat negatif. Kehamilan di luar nikah yang terjadi di kalangan remaja disebabkan karena adanya pengaruh dari budaya barat yang cenderung menjurus ke arah pergaulan bebas. Kehamilan di luar nikah membuktikan bahwa seorang remaja tidak dapat mengambil keputusan yang baik dalam pergaulannya. Salah satu dampak negatif dari remaja yang hamil di luar nikah adalah putus sekolah.

Perkembangan teknologi yang canggih ini juga memberi efek negatif, misalnya maraknya game-game online dan penyewaan game

yang mengakibatkan anak-anak lebih memilih pergi ke rental-rental game dari pada sekolah. Sebagai contoh kasus, seorang responden yang bersekolah di tingkat SMP Pringsewu, pada awalnya seperti biasa setiap hari pergi dari rumah untuk pergi sekolah. Pada saat mendekati ujian semester ada kumpulan/musyawarah wali murid, orang tua murid tersebut ditegur pihak sekolah dan mengatakan bahwa yang bersangkutan kerap tidak hadir di sekolah dan itu terjadi berkali-kali. Setelah di telusuri ternyata walaupun dari rumah yang bersangkutan pamit pergi sekolah namun di tengah perjalanan yang bersangkutan tidak pergi kesekolah namun pergi ke tempat permainan game dan hal ini terjadi secara terus-menerus. Orang tua sudah berkali-kali mengingatkan dan memberi nasehat namun hal ini terjadi lagi. Akhirnya pindah sekolah dan sempat sekolah beberapa waktu namun kejadian yang sama terulang kembali, akhirnya yang bersangkutan berhenti sekolah (Responden, Pringsewu, 2015).

Tantangan Utama Dalam Pencapaian Sasaran Ekonomi

5

“ Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan”.

Adam Smith, 1776

Negara-negara Asia menghadapi berbagai tantangan besar perekonomian di masa depan. Tantangan–tantangan itu diantaranya adalah jebakan pendapatan kelas menengah, situasi tata kelola dan institusi ekonomi, *population aging* (orang tua) semakin banyak, ketimpangan terus tinggi, dan pengembangan sektor keuangan. "Jika mampu atasi ini, ekonomi Asia akan cemerlang," kata Direktur IMF Asia Changyong Rhee.

Selain itu, tantangan lainnya yang diperhadapkan sekaligus sebagai peluang adalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku sejak 1 Januari 2016. Melalui MEA, akan terjadi integrasi sektor ekonomi yang meliputi *free trade area*, penghilangan tariff perdagangan antar-negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang besar, pertumbuhan konsumsi, dan iklim investasi yang makin baik.

Menurut hasil kajian Pusat Kebijakan Regional Bilateral Departemen Keuangan, 2014 dijelaskan bahwa dengan hadirnya ajang MEA ini,

Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap MEA, ketidaksiapan daerah menghadapi MEA, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi, serta kondisi SDM dan ketenagakerjaan.

Tentu saja kita harus berusaha untuk terus meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi di tahun-tahun mendatang, agar Indonesia khususnya Provinsi Lampung memperoleh manfaat besar dari integrasi ekonomi Asia Tenggara. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu.

Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu tujuan SDGs yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan modal manusia (*Human Capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam paradigma pembangunan

manusia, pendapatan menjadi suatu alat untuk menguasai sumber daya agar dapat terwujud suatu kehidupan yang layak. (SDGs)

Gambar 5.1 Tiga Dimensi dan Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals (SDGs)



Pertumbuhan yang pro kemiskinan merupakan cara untuk dapat menghasilkan output yang signifikan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), penempatan ekonomi ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan cepat diperlukan guna memastikan kesempatan kerja produktif untuk semua dan pengentasan kemiskinan. Hal ini akan memerlukan intensifikasi dan peningkatan pertanian yang berorientasi pada pasar. Diversifikasi ekonomi dengan prioritas diberikan untuk mengembangkan hubungan ke dan dari sektor pertanian, rantai nilai tambah domestik yang kuat

dan manufaktur modern. Juga agar intensifikasi dan pengembangan ceruk pasar ekspor mencapai pertumbuhan yang adil, pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif (meluas dan merata) baik antar tingkat pendapatan dan wilayah maupun antar gender dan pro rakyat miskin.

Sebagai salah satu unsur penentu angka Indeks Pembangunan Manusia, komponen daya beli memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi karena menyangkut kemampuan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. Gambaran daya beli masyarakat di suatu wilayah dapat menjadi sinyal utama sejauhmana keberhasilan pembangunan ekonomi, karena rendahnya daya beli identik dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran.

Terdapat dua faktor penentu daya beli masyarakat yakni pendapatan dan inflasi. Pertama terkait dengan kemampuan menghasilkan pendapatan, sedangkan kedua menyangkut kinerja makroekonomi aspek stabilitas harga. Ketika harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan atau terjadi inflasi, maka kemampuan mendapatkan barang-barang akan menurun jika besarnya pendapatan tetap. Agar daya beli tetap maka harus terjadi kenaikan pendapatan yang melebihi besarnya tingkat inflasi. Kondisi yang lebih baik adalah pendapatan terus meningkat di satu sisi dan terjadi stabilitas harga.

Upaya-upaya ekonomi yang bisa difokuskan adalah peningkatan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan

kesehatan yang berkualitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan kelompok miskin.

5.1. Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di manapun. Mayoritas masyarakat miskin merupakan kalangan yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu selain membutuhkan bantuan pemberdayaan, masyarakat miskin juga membutuhkan akses kepada sumber permodalan usaha. Dalam kaitan ini, lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang diakui oleh peraturan yang ada adalah bank perkreditan rakyat (BPR), koperasi simpan pinjam, koperasi kredit (*credit union*), dan kredit mikro yang dilayani oleh bank-bank besar yang membuka layanan kredit mikro.

Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan maupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha. Namun masyarakat miskin mempunyai persepsi bahwa mengurus kredit mikro ke perbankan sulit, selain itu keengganan untuk berinteraksi dengan perbankan dipengaruhi oleh dugaan adanya biaya administrasi perbankan yang besar (BAPPENAS, 2011).

Dengan kata lain, mengupayakan pembiayaan bagi usaha usaha mikro akan bermuara pada pengentasan kemiskinan. Pendanaan bagi usaha mikro merupakan salah satu aspek yang menjadi substansi regulasi dan kebijakan dalam menumbuhkan iklim usaha. Inilah yang diupayakan pemerintah pusat dan daerah untuk

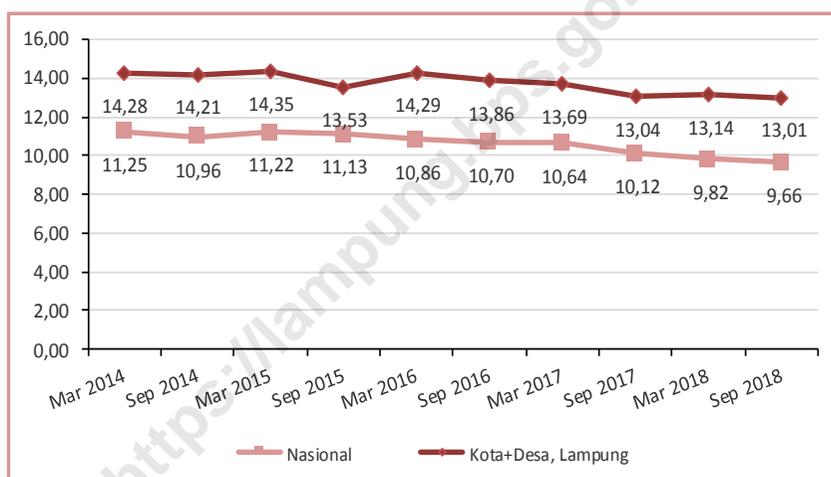
memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Seluruhnya bertujuan agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Sejak Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, hingga lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah memberikan landasan yang kokoh bagi keberadaan usaha mikro.

Strategi pengentasan kemiskinan di pedesaan harus dikaitkan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur pertanian di pedesaan. Adanya pembinaan usaha tani padat modal yang digalang oleh suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara diharapkan dapat memperbaiki sistem kelembagaan sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan usaha mikro merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis.

Secara rata-rata, angka kemiskinan di Provinsi Lampung hingga tahun 2018 masih berada di atas angka nasional. Berdasarkan Gambar 5.2 terlihat bahwa angka kemiskinan pada bulan September 2018 relatif menurun. Pada Maret 2014 angka kemiskinan di Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.142,92 ribu jiwa, atau sebesar 14,28 persen dari total penduduk. Kini kondisi akhir 2018, jumlah penduduk

miskin berkurang menjadi sebanyak 1.091,6 ribu jiwa dengan persentase sebesar 13,01 persen. Dengan kata lain selama periode Maret 2014–September 2018 telah terjadi pengurangan penduduk miskin sejumlah 51,32 ribu jiwa, atau telah turun sebesar 1,27 persen. Angka kemiskinan Provinsi Lampung September 2018 ini lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 9,66 persen.

Gambar 5.2 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional, 2014-2018



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk miskin kondisi September 2018 lebih terkonsentrasi di perdesaan dengan angka sebesar 14,73 persen. Cukup jauh terpaut dengan kemiskinan di perkotaan yang sebesar 9,06 persen. Dari sisi jumlah penduduk miskin juga terdapat beda yang signifikan yakni 230,20 ribu jiwa di perkotaan dan 861,40 ribu jiwa di perdesaan.

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Lampung, 2014-2018

Tahun	Penduduk Miskin (Ribu)			Angka Kemiskinan			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mar 2014	230,63	912,28	1 142,92	11,08	15,41	14,28	306 600
Sept 2014	224,21	919,73	1 143,93	10,68	15,46	14,21	318 822
Mar 2015	233.27	930.22	1163.49	10.94	15.56	14.35	337 996
Sept 2015	197.94	902.74	1100.68	9.25	15.05	13.53	356 771
Mar 2016	233.39	936.21	1169.60	10.53	15.69	14.29	364 922
Sept 2016	227.44	912.34	1139.78	10.15	15.24	13.86	368 592
Mar 2017	228.32	903.41	1131.73	10.03	15.08	13.69	384 882
Sept 2017	211.97	871.77	1083.74	9.13	14.56	13.04	390 183
Mar 2018	228.82	868.22	1097.05	9.27	14.76	13.14	402 307
Sept 2018	230.20	861.40	1091.60	9.06	14.73	13.01	409 881

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2014-September 2018 lebih signifikan terjadi di daerah urban (perkotaan) yang menurun 2,02 persen (0,4 ribu jiwa), sedangkan di daerah rural (perdesaan) hanya mengalami penurunan 0,68 persen (50,9 ribu jiwa). Berarti pada periode ini penurunan tingkat kesejahteraan penduduk miskin lebih cepat terjadi di perkotaan dibanding di perdesaan.

Turunnya angka kemiskinan pada periode yang sama berbarengan dengan meningkatnya garis kemiskinan. Pada hakikatnya penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/bulan dibawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, akan semakin banyak penduduk miskin jika tidak diikuti peningkatan pendapatan.

Selama amatan 5 tahun terakhir, garis kemiskinan naik sebesar Rp103.281,- atau 33,68 persen, yaitu dari Rp306.600,- per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp409.881,- per kapita per bulan pada September 2018. Meskipun Garis Kemiskinan meningkat, hal ini tidak diikuti dengan naiknya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan sudah mampu mengimbangi kenaikan harga pada saat Garis Kemiskinan mengalami kenaikan.

5.2. Karakteristik Defisiensi Lapangan Kerja Produktif dan Pekerjaan yang Layak

Para pekerja miskin dapat dikategorikan lebih jauh menurut penyebab dan bentuk manifestasinya yang paling mendekati, dan dari hasil imbal balik ke tenaga kerja yang tidak mencukupi. Menurut ILO definisi tersebut terdiri dari setengah pengangguran (*underemployment*); setengah pengangguran terbuka dan setengah pengangguran terselubung. Rendahnya imbal balik ke tenaga kerja (*low returns to labour*) yaitu mereka yang bekerja dengan imbal balik atau penghasilan tenaga kerja yang rendah, mereka yang bekerja dengan keahlian minim, teknologi minim dan/atau faktor-faktor pelengkap yang tidak mencukupi, dan mereka yang menderita akibat buruknya nilai tukar dagang karena harga produk yang rendah ataupun biaya input yang tinggi, atau dua-duanya.

5.2.1 Dominasi Sektor Pertanian

Ekonomi Provinsi Lampung didominasi oleh sektor pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan sektor jasa yang sedang tumbuh berkembang disaat sektor publik memainkan peranan penting. Sementara peran dari sektor manufaktur dalam ekonomi relatif menguat. Kontribusi sektor pertanian terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2018 relatif cukup tinggi, yaitu 30,00 persen dibandingkan dengan peranan pertanian secara nasional yang hanya sebesar 12,81 persen. Kategori Industri Pengolahan berada pada posisi kedua yaitu mencapai 19 persen. Kategori penyumbang terbesar ketiga dan keempat ditempati kategori Perdagangan dan Konstruksi masing-masing mencapai 11 persen dan 9 persen.

Gambar 5.3 Kontribusi Sektor Dominan PDRB Provinsi Lampung (Persen), 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2018 kategori Pertanian di Provinsi Lampung hanya tumbuh sebesar 1,01 persen, berada di bawah pertumbuhan sektor pertanian secara nasional yang sebesar 3,91 persen. Hal yang sama terjadi sejak tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan kategori Pertanian di Provinsi Lampung menurun disaat terjadi penguatan pertumbuhan secara nasional. Berbeda dengan kondisi sebelum tahun 2014, disaat pertumbuhan kategori Pertanian Provinsi Lampung bahkan pernah melampaui pertumbuhan di tingkat nasional.

Gambar 5.4 Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Lampung dan Indonesia (Persen), 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Surya Ayomi, 2014 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian tidak mampu menekan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Sehingga dengan demikian dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah adalah adanya rangsangan ekonomi berupa terjangkaunya harga sarana produksi, harga jual yang baik, serta penggunaan teknologi dan sasaran penanganan pasca panen. Selain bertumpu

pada rangsangan ekonomi, adanya perbaikan saluran tersier dan peningkatan subsidi input pertanian oleh pemerintah akan dapat secara efektif menjangkau kebutuhan khususnya sektor pertanian.

5.2.2 Masih Rendahnya Tingkat Upah Buruh

Selanjutnya tinggi rendahnya upah buruh sangat menentukan kesejahteraan buruh. Semakin tinggi upah yang diterima semakin tinggi tingkat kesejahteraan buruh. Upah buruh yang rendah cenderung menunjukkan ketidakmampuan untuk bersaing dan menghambat tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Upah yang tinggi membuat daya beli masyarakat meningkat yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan buruh dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Nilai rata-rata kenaikan upah buruh tiap tahun lebih besar dibanding dengan nilai inflasi. Inflasi menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, dan akan berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah selain meningkatkan gaji pegawai juga menekan laju inflasi. Pengaruh inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dieliminir apabila kenaikan gaji pegawai lebih besar dari inflasi. Dengan nilai rata-rata kenaikan upah buruh yang lebih besar dari inflasi yang terjadi pada tahun yang sama menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh meningkat, walau peningkatannya tidak sebesar kenaikan upah yang diterima karena harus dikurangi dengan besarnya inflasi.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu ukuran daya beli masyarakat. Tingginya UMP merefleksikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2014-2018, UMP Provinsi Lampung terus meningkat dari 1,4 juta rupiah naik menjadi 2,1 juta rupiah. Namun tingkat UMR Provinsi Lampung dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera relatif lebih rendah.

Tabel 5.2 Perbandingan Upah Minimum Regional/Provinsi Se-Sumatera (Rupiah), 2014-2018

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ACEH	1 750 000	1 900 000	2 118 500	2 500 000	2 717 750
SUMATERA UTARA	1 505 850	1 625 000	1 811 875	1 961 354	2 132 188
SUMATERA BARAT	1 490 000	1 615 000	1 800 725	1 949 284	2 119 067
RIAU	1 700 000	1 878 000	2 095 000	2 266 722	2 464 154
JAMBI	1 502 300	1 710 000	1 906 650	2 063 000	2 243 718
SUMATERA SELATAN	1 825 000	1 974 346	2 206 000	2 388 000	2 595 995
BENGGULU	1 350 000	1 500 000	1 605 000	1 737 412	1 888 741
LAMPUNG	1 399 037	1 581 000	1 763 000	1 908 447	2 074 673
KEP. BANGKA BELITUNG	1 640 000	2 100 000	2 341 500	2 538 673	2 755 443
KEP. RIAU	1 665 000	1 954 000	2 178 710	2 358 454	2 563 875

5.2.3 Masih besarnya kontribusi tenaga kerja sektor informal

Mengutip perkataan Mahbub UL-hag (1970) *"Let us take care of employment, employment will take care of growth"*. Dalam dua dasawarsa terakhir, terjadi pengembangan penelitian dalam modal manusia. Salah satunya adalah Barro (1991) yang menemukan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi negara hasil

penelitiannya tidak dapat dijelaskan baik oleh capital fisik dan input tenaga kerja, dan tekanan untuk dapat menjelaskan anomali tersebut. Pada saat yang bersamaan munculnya teori *Endogenous Growth Theory* (Romer, 1986) yang memberikan alat yang sesuai bagi para ahli untuk menyelidiki hal itu. Usaha mula-mula yang nampak pada literatur menitikberatkan pada investasi modal manusia. Penelitian ini masih tetap populer sampai saat ini. Para peneliti memasukan lamanya sekolah dan tingkat melek huruf. Modifikasi terbaru model memasukan iterasi partisipasi sekolah dan putus sekolah ke dalam model.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam meningkatkan perekonomian. Tepat sekali sebuah ungkapan berikut ini "Manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi tujuan akhir pembangunan". BPS, Bappenas dan UNDP pada tahun 2004 membahas komposisi tenaga kerja menurut pendidikan dan usia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pengangguran dan setengah pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta pekerja formal dan informal. Apakah tenaga kerja Provinsi Lampung dapat bersaing dalam MEA? Apakah dapat memanfaatkan peluang bonus demografi? Suatu potensi (*window of opportunity*) akan menjadi bencana (*window disaster*) apabila kualitas yang dimiliki oleh penduduk kelompok usia produktif tersebut tidak memadai. Potensi tersebut justru dapat menjadi bencana akibat terjadi "ledakan pengangguran" usia produktif. Setelah tahun 2030, Indonesia kemudian akan menghadapi peningkatan pesat pada kelompok penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas.

Pada momen *Windows of Opportunity* inilah keuntungan ekonomis diperoleh. Supply tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita. Penurunan proporsi penduduk usia anak-anak juga bakal mengurangi besarnya biaya untuk pemenuhan kebutuhannya, karena dapat dialihkan kegunaannya untuk saving dan investasi berupa tabungan, pendidikan berkualitas, kursus, asuransi kesehatan, asuransi hari tua, saham dan pengembangan bisnis lain. Dan peranan perempuan dengan jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja dan akan membantu peningkatan pendapatan.

Gambar 5.5 Konsep *Windows of Opportunity*



Untuk menjadikan pertumbuhan penduduk usia muda sebagai *window opportunity*, penduduk perlu mendapatkan pendidikan yang memadai, kualitas pekerja yang lebih ditingkatkan, dan penyediaan lapangan kerja yang optimal. Menurut Moertiningsih (2005), fenomena kependudukan ini akan optimal jika tersedia tenaga kerja berkualitas, tabungan tinggi, serta meningkatnya partisipasi perempuan, dan pengangguran rendah dan produktif.

Fenomena tersebut disebabkan karena komponen pengangguran terbuka yang didominasi oleh para pencari kerja tidak

lagi tertarik untuk masuk di sektor pertanian. Banyak sebab yang melatarbelakangi minimnya minat kerja di sektor ini diantaranya karena pertanian di wilayah ini masih menggunakan teknologi tradisional sehingga memperlambat laju pertumbuhan outputnya. Menurut Sukirno (2002) negara berkembang dimana setengah dari penduduknya berada di sektor pertanian justru berpotensi terdapat masalah pengangguran tersembunyi. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input pertanian yang masih sederhana, kurangnya infrastruktur pertanian menyebabkan produktivitas sektor tersebut masih rendah dan masalah kemiskinan yang meluas.

Tabel 5.3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung, Februari-Agustus 2018

Uraian	Februari 2018		Agustus 2018		Perubahan	
	Absolut (000)	%	Absolut (000)	%	Absolut (000)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja (TPAK)	4 395,9	72,84	4 232,1	69,67	-163,8	-3,73
Laki-laki	2 684,6	86,77	2 707,2	86,96	22,6	0,19
Perempuan	1 711,3	58,18	1 524,8	51,49	-186,5	-6,69
Pengangguran Terbuka	190,4	4,33	171,7	4,06	-18,7	-0,27
Laki-laki	140,1	5,22	103,2	3,81	-36,9	-1,41
Perempuan	50,4	2,94	68,4	4,49	18	1,55

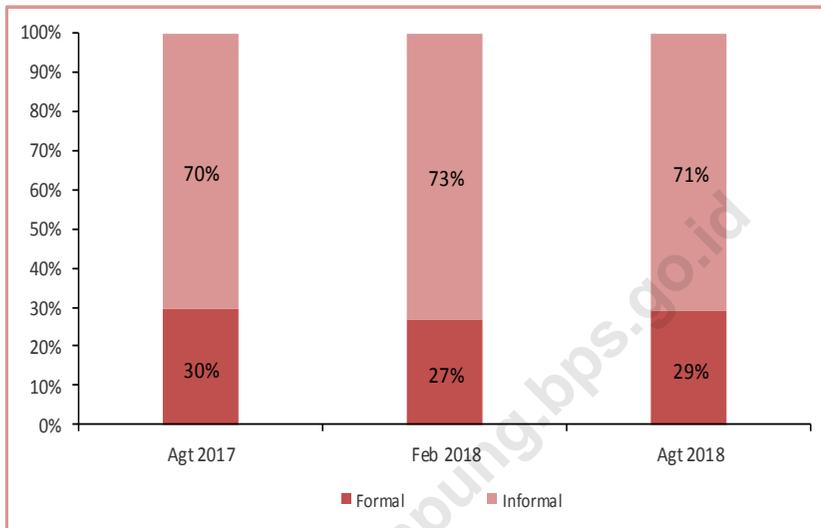
Sumber: BPS, SAKERNAS,2018

Disparitas jender pada partisipasi angkatan kerja sangat timpang. TPAK laki-laki sebesar 86,96 persen hampir dua kali lipat TPAK perempuan yang hanya 51,49 persen (Agustus 2018). Kondisi ini berkaitan dengan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Laki-laki berperan sebagai pencari nafkah (*breadwinner*), sedangkan perempuan mengelola rumah

tangga dan mengasuh anak-anaknya. Dibandingkan dengan Februari 2018, partisipasi laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja masing-masing mengalami kenaikan 0,19 poin sementara perempuan mengalami penurunan 6,69 poin. Disparitas gender pada pengangguran direpresentasikan oleh TPT perempuan yang lebih rendah dibanding TPT laki-laki yakni 4,49 persen berbanding 3,81 persen. TPT yang relatif besar mengindikasikan adanya potensi yang tinggi pada partisipasi kerja.

Jumlah angkatan kerja yang besar tidak terserap oleh pertumbuhan ekonomi atau terserap tetapi hanya di sektor informal yang tidak produktif. Peranan perempuan dalam pasar kerja meningkat tetapi dengan kualitas pekerjaan yang (sektor informal, pekerja keluarga tak dibayar). Tabungan belum terwujud karena rendahnya pendapatan. Pengangguran muncul karena rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja di sektor industri modern dan tingkat pertumbuhan yang cepat dari persediaan tenaga kerja kota yang berasal dari desa (Todaro,1995). Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Gambar 5.6 Perkembangan Penduduk yang Bekerja menurut Kegiatan Ekonomi Formal dan Informal di Provinsi Lampung Agustus 2017-2018



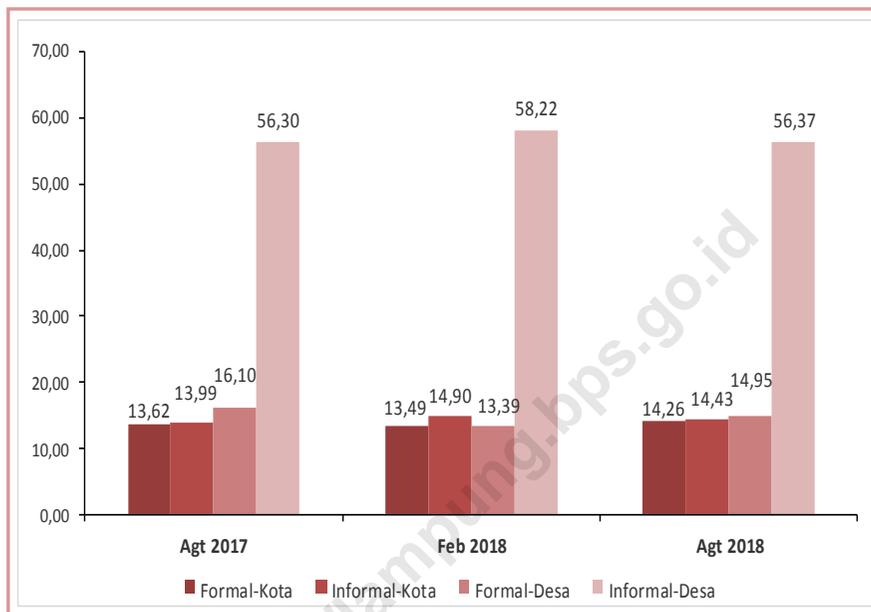
Sumber: BPS, SAKERNAS 2017-2018

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran ternyata semu karena tenaga kerja informal masih besar dan *underemployment* setiap tahun meningkat. Bukti kegagalan transformasi dalam pasar kerja formal adalah masih besarnya kontribusi tenaga kerja informal di sektor pertanian dalam pasar kerja di Lampung. Data menunjukkan 43 persen tenaga kerja di Provinsi Lampung adalah tenaga kerja informal yang bekerja di sektor pertanian sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian sebesar 30 persen. Artinya, pergeseran struktur ekonomi tidak diikuti oleh perpindahan tenaga kerja di sektor pertanian dan informal. Secara tidak langsung sektor informal dapat menunjang kehidupan di sebagian besar penduduk perkotaan maupun pedesaan yang terbelenggu kemiskinan (Lamba, 2011).

Adanya sektor informal merupakan usaha yang tidak memerlukan modal banyak, pendidikan tinggi, urus izin yang berbelit, teknologi canggih tapi memerlukan *skill* atau keahlian. Faktor-faktor seperti ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor ini. Seperti contohnya masyarakat dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2018, status pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan (26,48 persen), diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (19,44 persen) dan berusaha sendiri (18,06 persen). Dalam periode satu semester terakhir (Februari 2017 – Agustus 2018) berkurangnya jumlah tenaga kerja didominasi para pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Sedangkan pekerja dengan status berusaha sendiri berkurang sekitar 75,5 ribu.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja dialami oleh pekerja informalm sedangkan pekerja formal justru mengalami kenaikan. Angka pengangguran juga cenderung turun dan tingkat kemiskinan juga menurun, dan jumlah tenaga kerja yang memiliki jam kerja normal terjadi peningkatan. Postur saat ini 71 persen pekerja ada di sektor informal membuat perekonomian relatif kurang sehat.

Gambar 5.7 Perkembangan Penduduk yang Bekerja menurut Kegiatan Ekonomi Formal/Informal dan Kota-Desa di Provinsi Lampung, Agustus 2017 - Agustus 2018

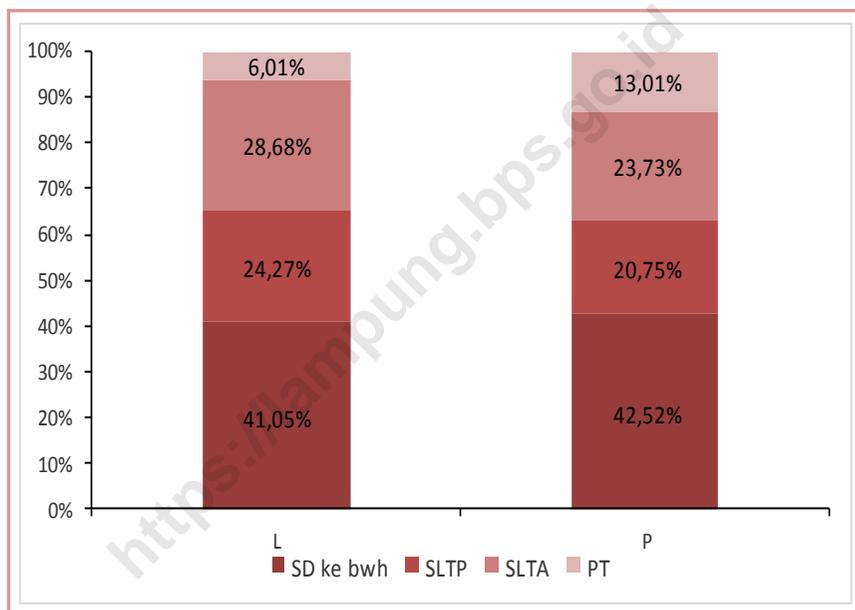


Sumber: BPS, SAKERNAS

Ketimpangan kegiatan ekonomi formal dan informal terlihat signifikan di perdesaan dibanding perkotaan. Pada Agustus 2018, jumlah pekerja informal di perdesaan mencapai 70,80 persen atau hampir empat kali jumlah pekerja formal. Pekerja di sektor informal umumnya berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keterampilan khusus. Kondisi ini terkait erat dengan rendahnya produktivitas di perdesaan. Sementara itu, jumlah pekerja formal dan informal di perkotaan relatif berimbang yakni sebanyak 14,26 persen dan 14,95 persen. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya peran sektor informal dalam kegiatan ekonomi di perkotaan.

Tenaga kerja menurut pendidikan, mutu modal manusia (*human capital*) masih rendah walaupun ada peningkatan signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Tidak ada disparitas jender yang signifikan pada latar belakang pendidikan angkatan kerja .

Gambar 5.8 Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Provinsi Lampung, 2018



Sumber: BPS, SAKERNAS, 2018

Berbicara tentang pendapatan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari kontribusi seluruh anggota rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan. Anggota rumah tangga perempuan terdiri dari istri kepala rumah tangga, anak perempuan, menantu dan anggota rumah tangga perempuan lainnya. Saat ini banyak perempuan yang bekerja atau harus bekerja untuk memenuhi atau menambah pendapatan rumah tangga. Perempuan bekerja untuk menambah

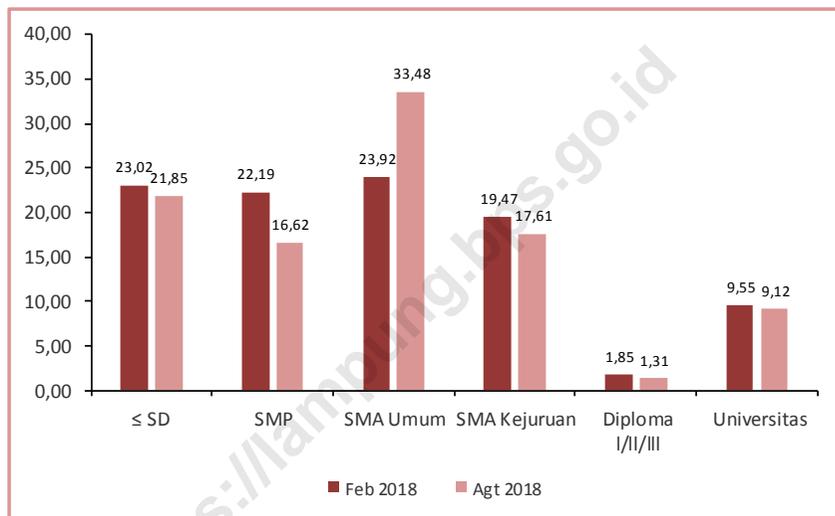
penghasilan tidak dapat terlepas dari situasi kemiskinan yang melanda suatu rumah tangga, akan tetapi perempuan bekerja tentunya bukan hanya karena faktor kemiskinan tetapi juga faktor kesempatan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang perempuan.

Perempuan mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin. Dalam rumah tangga miskin anggota rumah tangga perempuan terjun ke pasar kerja untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan tidak cukup. Perempuan ternyata lebih mudah memasuki pasar kerja terutama sektor informal. Hasil penelitian *Badrun (2004)*, mengatakan bahwa dari 53,44 persen perempuan yang bekerja, 72,29 persen adalah pekerja tetap, artinya perempuan mempunyai kepastian dalam memperoleh pendapatan. Kontribusi perempuan pada peningkatan pendapatan rumah tangga miskin perbulan cukup signifikan yaitu sebesar 39,91 persen atau Rp. 272.357 dari total pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 681.081. Perempuan juga mempunyai kemampuan untuk bekerja di sektor publik, selain lebih luwes dan lebih mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi krisis ekonomi, misalnya, perempuan lebih banyak mengambil inisiatif untuk menggantikan peran suami yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam mencari nafkah.

Kontribusi perempuan di bidang ekonomi telah membantu mengangkat keluarga dari kondisi sangat miskin ke kondisi diambang garis tidak miskin. Apabila perempuan (dalam hal ini istri dan anak perempuan) tidak membantu ekonomi rumah tangga, dapat diduga bahwa kondisi ekonomi rumah tangganya akan lebih . Menurut *Dong Kyo Choi dan Dai Young Kim* bahwa kontribusi perempuan dalam

rumah tangga berpendapatan rendah adalah tinggi, dan sebaliknya kontribusi perempuan dalam rumah tangga berpendapatan tinggi adalah rendah.

Gambar 5.9 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Lampung, Februari-Agustus 2018



Sumber: BPS, SAKERNAS, 2018

Ditinjau dari tingkat pendidikan terlihat bahwa pengangguran didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA hingga sarjana. Kondisi ini diduga terkait dengan harapan terhadap jenis pekerjaan yang diinginkan. Mereka yang tidak terdidik tidak akan makan kalau tidak bekerja sehingga mereka mau melakukan pekerjaan apa saja demi sesuap nasi. Sedangkan bagi mereka yang memperoleh pendidikan lanjutan mereka hanya mau bekerja kalau hal itu memberi uang, status atau kepuasan yang relatif tinggi. Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan dapat diibaratkan seperti benang kusut yang sangat susah dibenahi. Menurut Mubyarto (2004) kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan yang disebabkan

oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

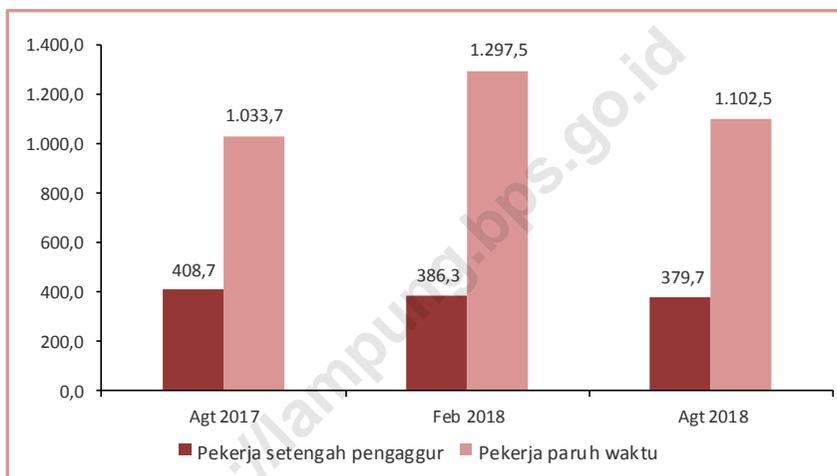
Pengangguran merupakan salah satu masalah pokok dalam bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi beban bagi penduduk yang bekerja, karena harus menanggung biaya ekonomi para pengangguran tersebut. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menimbulkan permasalahan lainnya, seperti masalah sosial, keamanan, dan stabilitas politik.

Informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan pengangguran namun kurang mendapat perhatian adalah jumlah pekerja yang tergolong setengah pengangguran. Golongan ini mencakup pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam dalam seminggu). Rendahnya jumlah kerja tersebut mengindikasikan rendahnya pendapatan yang diperoleh pekerja tersebut, yang tentunya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraannya.

Ada dua kelompok setengah pengangguran, yaitu mereka yang masih mencari kerja (setengah penganggur terpaksa) dan mereka yang tidak mencari pekerjaan lagi (setengah penganggur sukarela). Pada Agustus 2018, setengah pengangguran berjumlah 1,48 juta jiwa atau 36,50 persen dari penduduk bekerja. Menurun dibanding Februari 2018 yang mencapai 1,68 juta jiwa. Ini merefleksikan naiknya produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Dari dua jenis setengah pengangguran, setengah penganggur, terpaksa terlihat berfluktuasi dengan terjadi penurunan pada bulan Agustus dan kenaikan pada

Fenomena ini biasanya dipengaruhi oleh peningkatan daya beli, walaupun jam kerja pendek, pendapatan yang diperoleh sudah mencukupi. Sedangkan Setengah Penganggur Sukarela terjadi penurunan di setiap semester.

Gambar 5.10 Setengah Pengangguran di Provinsi Lampung, Agustus 2017-2018



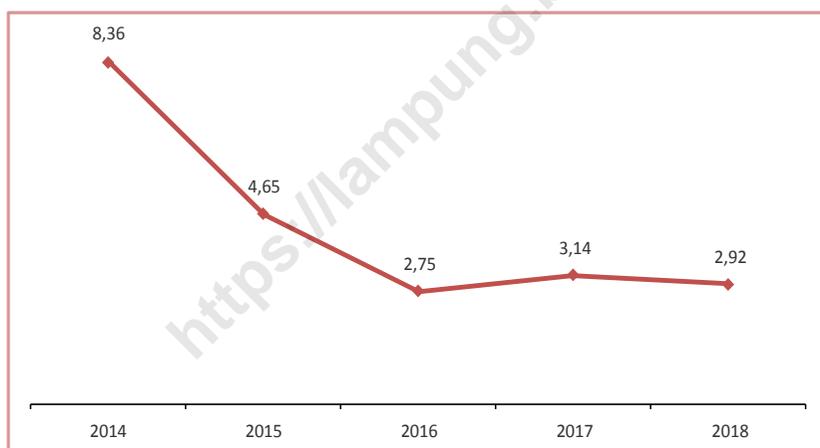
Sumber: BPS, SAKERNAS, 2018

5.2.4 Masih belum stabilnya Tingkat Inflasi

Naiknya harga barang yang dibutuhkan masyarakat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, semakin tinggi indeks harga konsumen berarti harga barang yang dibutuhkan masyarakat semakin mahal sehingga masyarakat tidak mampu menjangkau. Semakin rendahnya daya beli masyarakat atau semakin tidak mampunya masyarakat untuk mengkonsumsi barang menunjukkan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga barang tersebut tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat apabila pendapatan masyarakat naik lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga barang. Hasil analisis menunjukkan bahwa

indeks upah buruh selalu lebih tinggi dibanding dengan indeks harga konsumen, sehingga buruh masih mampu membeli barang kebutuhan hidupnya karena upahnya naik lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga barang, bahkan daya belinya meningkat oleh karenanya kesejahteraan buruh lebih baik. Inflasi bahan makanan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil penelitian Ravallion (2008) bahwa kenaikan harga bahan makanan di Indonesia sebesar 10 persen akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 2 juta jiwa (1 persen).

Gambar 5.11 Perkembangan Inflasi Kota Bandar Lampung, 2014-2018



Sumber: BPS, SAKERNAS, 2018

Besaran inflasi selama periode 2014-2018 di Kota Bandar Lampung menunjukkan kecenderungan yang menurun dari 8,36 persen tahun 2014 menjadi 2,92 persen pada 2018. Akan tetapi, didalamnya terjadi fluktuasi, tepatnya terjadi pada tahun 2017 yang sedikit naik dibanding tahun sebelumnya, dan kemudian turun ke titik 2,92 persen ditahun 2018.

Orang miskin relatif lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan makanan. Oleh sebab itu, efek inflasi bahan makanan akan lebih bagi orang miskin. Dampak kenaikan harga terhadap besarnya peningkatan angka kemiskinan tergantung terhadap posisi pemasaran (*net marketing position*) sebagai konsumen bahan makanan (*net food buyer*) atau produsen bahan makanan (*net food seller*) dan besarnya konsumsi masyarakat yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Hasil studi bank dunia 2008 juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia (lebih dari 75 persen) adalah konsumen bahan makanan (*net food buyer*) bukan produsen bahan makanan (*net food producer*) sehingga peningkatan harga bahan makanan ini tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat

5.2.5 Ketimpangan antar kelompok pendapatan

Upaya pembangunan manusia dari sisi ekonomi tidak hanya dihadapkan pada permasalahan belum efisiennya penggunaan tenaga kerja pertanian, tetapi juga dihadapkan pada masalah ketimpangan. Hal tersebut terlihat dari distribusi pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung yang belum merata. Kondisi ketimpangan di Provinsi Lampung berdasarkan kriteria bank dunia pada September 2014 berada pada ketimpangan sedang. Di tahun tersebut 40 persen penduduk berpengeluaran terendah menikmati 21 persen pengeluaran daerah. Sementara itu 20 persen penduduk berpengeluaran tinggi menguasai 42 persen pengeluaran daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan daya beli masyarakat di tahun 2014 akan lebih banyak dinikmati oleh penduduk berpendapatan tinggi. Bila dibandingkan dengan distribusi pengeluaran nasional,

distribusi pengeluaran Provinsi Lampung lebih merata dibandingkan dengan distribusi pengeluaran se-Indonesia. Hampir 50 persen distribusi pengeluaran daerah dinikmati oleh 20 persen penduduk tingkat atas.

Tabel 5.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk menurut Kriteria Bank Dunia Provinsi Lampung dan Nasional, Maret 2018

Indikator	Lampung	Nasional
(1)	(2)	(3)
40 % bawah	19,64	16,48
40 % tengah	37,22	34,83
20 % atas	42,03	48,69

Sumber: BPS, SAKERNAS 2018

Dalam upaya mengurangi defisiensi lapangan kerja produktif perlu memahami sifat dari defisiensi lapangan kerja produktif dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala pada serta peluang untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja, dengan fokus pada memberikan dasar pengetahuan yang baik untuk dapat mengembangkan kebijakan yang efektif, reformasi kelembagaan dan intervensi lainnya. Dan salah satu program pemerintah yang sedang gencar dikembangkan adalah usaha Mikro yang selama ini tidak berjalan dengan mulus atau stagnan, dikarenakan rendahnya laju pertumbuhan usaha kecil, karena para usaha kecil mengalami keterbatasan modal, yang diperberat dengan terbatasnya akses pada perbankan karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan bank teknis. Kendala-kendala lain yang juga menjadi penyebab tersebut, antara lain kesulitan dalam mengakses pasar dan informasi, belum memiliki administrasi yang teratur, minimnya aktiva tetap, kurang terjaminnya pasokan bahan baku,

pendidikan yang relatif rendah, kurang mampu bersaing, kualitas produk kurang memadai, dan jauh dari sentuhan teknologi.

5.3. Tantangan dan Peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan data, *Indepth study* (studi mendalam), dan *Focus Group Discussion* (FGD), dapat teridentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab Defisiensi lapangan kerja produktif dan pekerjaan yang layak

1. Masih Rendahnya Penyerapan Modal Kredit

Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, dan kecil (KUMK). Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh izin usaha, kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya lembaga resmi yang dapat memberi modal dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh kapasitas masyarakat miskin. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat pengusuran. Usaha koperasi juga sering menghadapi kesulitan untuk menjadi badan hukum karena

persyaratan yang sangat rumit, seperti batas modal, anggota, dan kegiatan usaha.

Biaya keuangan adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat investasi dalam sebuah ekonomi, faktor lainnya adalah pengembalian keuntungan (imbal balik) yang diharapkan ke investasi. Biaya modal dapat bergantung pada serangkaian faktor, seperti akses simpanan dalam negeri, akses ke modal internasional, kebijakan moneter dan pasar modal yang berfungsi. Berbagai tipe aktor-aktor ekonomi seringkali tidak memiliki akses yang sama ke modal eksternal. Dalam situasi dimana pasar keuangan tidak berfungsi baik atau lembaga dan mekanisme yang tidak efisien untuk pelaksanaan kontrak dan penetapan hak-hak kepemilikan, perusahaan kecil cenderung untuk menderita karena akses ke keuangan eksternal.

Rendahnya pemanfaatan akses modal kredit usaha baik dari pihak perbankan maupun non perbankan nyatanya benar-benar terjadi. Hasil *indepth study* terhadap beberapa rumah tangga responden SUSENAS di Provinsi Lampung yang memanfaatkan kredit usaha. Pada *indepth study* tersebut dihasilkan temuan yang menarik perihal pemanfaatan kredit usaha. Pada rumah tangga berpendapatan menengah berhasil memanfaatkan kredit usaha dari perbankan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan pada rumah tangga berpendapatan rendah tidak memanfaatkan kredit baik dari perbankan ataupun koperasi, melainkan dari tengkulak. Ironisnya usaha tersebut tidak berkembang, kredit yang diperoleh hanya gali lubang tutup lubang, hutang kredit sekarang untuk membayar hutang yang lalu.

Kredit perbankan adalah salah satu fasilitas yang dapat digunakan oleh dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Salah satu masalah yang sering menjadi penghambat dalam penyaluran kredit perbankan adalah tidak adanya agunan. Risiko kredit macet pada UMKM relatif besar. Oleh karena itu pihak perbankan akan ragu menyalurkan kredit bila tidak dilengkapi dengan jaminan. Dalam FGD terungkap bahwa salah satu bank syariah yang pernah beroperasi di Kabupaten Tanggamus kolaps akibat kredit macet.

Hambatan lain dalam penyaluran kredit perbankan adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk layanan perbankan. Bagi masyarakat kelas bawah, prosedur untuk memperoleh kredit terkesan rumit dan sulit. Selain itu, kebutuhan akan agunan juga sulit dipenuhi terutama oleh kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah. Sebagaimana terlihat pada Tabel 5.6 Layanan kredit perbankan, termasuk juga koperasi, paling rendah dinikmati oleh kelompok rumah tangga dengan pengeluaran per kapita terendah.

Seperti diungkapkan salah seorang peserta FGD dari Lampung Timur “Program bank belum sepenuhnya berhasil karena banyak pelaku UMKM belum memahami tentang bagaimana mengakses ke program bank. Tidak bisa dipungkiri praktek “tengkulak” memang masih ada. Perlu kita pikirkan program apa yang bisa mengikis adanya tengkulak. Bisa menggunakan prinsip koperasi, misalnya kita (sekitar 60 orang pembuat gula merah) iuran 1 biji gula merah tiap orang per hari, maka selama 1 hari kita sudah bisa mengumpulkan sekitar 5 kg gula merah. Jika rutin tiap hari, tentu akan terkumpul banyak dan bisa dijadikan sebagai modal koperasi”

Tabel 5.5 Pemanfaatan KUR, Kredit Bank Bukan KUR, PNPM, dan Koperasi di Provinsi Lampung berdasarkan Golongan Pengeluaran, 2018

Golongan Pengeluaran	KUR	Kredit Bank Selain KUR	BPR	Koperasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	19,62	27,16	5,19	13,58
Perdesaan	26,19	18,91	5,13	15,44

Sumber: BPS, Susenas, 2018

Lebih jauh lagi, masalah ketimpangan nyatanya tidak hanya dalam hal pendistribusian pengeluaran, namun juga dalam hal akses terhadap modal. Pemberian bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum optimal pemanfaatannya. Nampak dari pemanfaatan KUR memang di perdesaan cukup banyak yang sudah mengaksesnya, namun persentasenya masih perlu di tingkatkan. Begitu pula dengan pemanfaatan kredit usaha lainnya seperti selain KUR, BPR dan koperasi.

Kendala yang dihadapi umumnya kesulitan masyarakat untuk akses ke lembaga keuangan/program perbankan. Beberapa responden yang sudah melakukannya umumnya berhasil tanpa adanya kesulitan untuk mengembalikan modal. Beberapa responden hasil wawancara mendalam umumnya tidak mengalami kesulitan terhadap akses permodalan dan pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha. Ada responden yang melakukan kredit dengan salah satu perbankan dibelikan kambing dan modal warung di rumah, usaha sama dan semakin maju, kambing yang tadinya dari 2 ekor sekarang sudah jadi 32 ekor, (Responden, Lampung Timur, 2015). Responden lainnya juga berhasil mengajukan kredit di salah satu lembaga keuangan tersebut dan tidak pernah terlambat dalam mencicil angsuran. Kredit usaha

yang diperoleh digunakan untuk usaha menggarap sawah tersebut dan tidak pernah terlambat dalam mencicil angsuran. Kredit usaha yang diperoleh digunakan untuk usaha menggarap sawah (pembelian bibit, pupuk, dan upah buruh) dan ngampas sembako (modal membeli dagangan)

Namun ada juga nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Sejak mendapatkan kredit tahun 2013 dari lembaga swadaya dan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut. Kredit yang diterima 5 juta digunakan untuk menambah modal usaha berjualan nasi uduk di sekolah. Namun ketika mengalami kesulitan dalam membayar angsuran karena dagangannya lagi sepi dan untuk membayar angsuran tersebut dengan meminjam ke anaknya. (Responden, Lampung Utara, 2015)

Demikian pula pemanfaatan kredit bank bukan KUR belum sepenuhnya dinikmati rumah tangga. Pemanfaatan kredit ini hanya mencapai 18,91 persen rumah tangga perdesaan. Besaran tersebut jauh lebih rendah dari rumah tangga perkotaan, sebanyak 27,16 persen rumah tangga telah memanfaatkan kredit bank bukan KUR. Perbedaan akses modal antara rumah tangga perkotaan dan perdesaan mendukung polemik ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi.

Agak berbeda dengan pemanfaatan dana BPR, persentase terbesar dinikmati rumah tangga perkotaan yaitu mencapai 5,19 persen. Sedangkan koperasi lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga perdesaan yaitu sebesar 15,44 persen. Dengan memberikan bantuan kredit, usaha pada pekerja pertanian setengah mengganggung

diharapkan mampu mendorong produktivitas mereka. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa persentase mereka yang sudah memperoleh manfaat masih relatif sedikit, dan masih potensial untuk dikembangkan.

Belum optimalnya pemanfaatan kredit usaha oleh rumah tangga bisa disebabkan kurangnya informasi akan kredit usaha dan sumber daya Manusia (SDM) yang rendah. Hal tersebut diakui oleh para *stakeholders* dalam *Focus Grup Discussion* (FGD) pendalaman IPM pada bulan Desember 2015. Menurut mereka pembinaan UMKM telah sering diberikan oleh dinas, namun sayangnya belum ada *feed back* positif. Karena rendahnya SDM, setelah acara pembinaan selesai para peserta pembinaan UMKM cenderung pasif, tidak ada pengembangan usaha.

“ asset yang tertanam di desa yaitu UPK PNPM Mandiri yg tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya ; simpan pinjam kelompok perempuan. Dengan bunga 12 % per tahun di Kabupaten Tulang Bawang ada sekitar kurang lebih 15.000 orang yang tercover di sini, Harusnya ada sosialisasi dari pemda agar dana dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin (peserta FGD dari kabupaten Tulang Bawang)

a. Belum Optimalnya Sosialisasi Kredit ke Masyarakat

Berkenaan dengan KUR-Mikro, pemerintah telah menunjuk beberapa Bank Nasional Bank pelaksana KUR -Mikro adalah BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN dan Bank Syariah Mandiri untuk melaksanakan KUR-Mikro dan menunjuk 2 lembaga sebagai penjamin KUR Mikro Lembaga Penjamin KUR -Mikro adalah PT Asuransi Kredit

Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Disalurkan kepada nasabah usaha mikro melalui Pola Hubungan (linkage) Bank dengan Lembaga Keuangan Mikro dengan plafon kredit Rp 5 juta, sebagai bentuk kepedulian sektor perbankan terhadap pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perbankan yang sehat. Keberadaan lembaga keuangan mikro dalam mekanis penyaluran KUR-Mikro ini dimaksudkan selain untuk mengatasi kendala tersedianya sumber daya manusia yang terbatas, juga mempermudah Bank menjangkau wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan daerah terpencil (Lastuti Abubakar,2008)

Sayangnya, bantuan kredit usaha yang dapat diperoleh dari dana UP2K, PNPM, Dana Desa serta program KUBE nyatanya belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, terutama masyarakat miskin. Akibatnya pemanfaatan dana tersebut belum mampu mendorong perbaikan tingkat ekonomi masyarakat miskin. Lebih jauh lagi kesemua program bantuan kredit usaha yang digulirkan pemerintah dianggap rumit oleh masyarakat miskin, dikarenakan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ditambah lagi pinjaman kredit usaha tidak bisa dicairkan dalam waktu cepat. Karena itulah masyarakat miskin lebih senang meminjam dari tengkulak dibandingkan mengambil kredit usaha.

Salah satu peserta FGD mengungkapkan bahwa “Sosialisasi kredit ke masyarakat ditingkatkan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mandiri di lingkungan masyarakat, dan tidak hanya fokus pada pengguliran dana PNPM saja, serta menjaga harga barang tidak naik”.

b. Proses dan agunan masih memberatkan

Usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala dalam hal produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan dan iklim usaha. Salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro adalah sulitnya memperoleh permodalan konvensional melalui kredit perbankan. Oleh karena itu, menarik untuk dicermati adalah upaya mencari alternatif pembiayaan baru dan pemberdayaan lembaga pembiayaan yang ada dan ideal untuk mendorong tumbuh kembang usaha mikro. Saat ini, alternatif pembiayaan yang ada bermula dari inisiatif pemerintah untuk memberikan jalan keluar bagi pelaku usaha yang sulit mendapatkan akses pada kredit perbankan yang sangat banyak aturan keta.

Regulasi perbankan yang ada memang belum sepenuhnya berpihak pada UMKM khususnya usaha mikro. Dalam menjalankan usahanya, perbankan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) termasuk dalam pemberian kredit. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Berisi aturan terkait kredit yaitu “apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur beritikad baik dan mempunyai kemampuan membayar, maka Bank dapat mengucurkan kreditnya”. Lebih lanjut, sebelum memberikan kredit Bank wajib melakukan analisa terhadap karakter (*character*), permodalan (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan agunan (*collateral*) bitur atau yang populer dikenal dengan ‘*The 5 C’s analysis of credit*’.

Namun seringkali dalam implementasi prinsip kehati-hatian dimaknai secara sempit. Berdasarkan Pasal 8 tersebut, yang dimaksudkan dengan kewajiban penyediaan agunan dalam pemberian kredit perbankan adalah agunan pokok berupa objek yang dibiayai dengan kredit, dan bukan agunan tambahan. Hal ini berarti Bank tidak perlu meminta agunan lain (agunan tambahan) selain objek yang dibiayai oleh kredit tersebut.

Dalam praktiknya, perbankan memerlukan Agunan Jaminan; adanya peraturan-peraturan yang harus diberlakukan dan biasanya sangat ketat, sehingga usaha mikro kurang menjadi perhatian pihak perbankan, serta prosedur yang relatif lama untuk pencairan dana pinjaman. Sebaliknya usaha mikro mempunyai karakter yang berbanding terbalik seperti usaha mikro tidak mempunyai agunan/jaminan, tidak familiar dengan peraturan perbankan yang ketat, serta tidak terbiasa dengan tindakan prosedural dan memerlukan dana dalam waktu yang singkat. Bahkan pelaku usaha mikro ini pun memandang sinis pada Bank dan menganggap rentenir sebagai penyelamat karena tidak berbelit-belit dan uang segera cair. Dari banyak studi sudah diketahui bahwa lemahnya akses kredit bagi penduduk miskin terletak pada kendala penyediaan agunan. Cara yang termudah bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman uang yang tidak bertele-tele adalah dari rentenir. Rentenir memang memiliki beberapa keunggulan diantaranya aktif dan rajin memberi kredit dan yang terpenting tidak bertele-tele dalam mendapatkan sumber dana.

Di sisi lain, kegiatan perbankan juga masih segan mengikuti jejak Grameen Bank yang mampu membuktikan bahwa keuangan mikro

merupakan pendekatan terbaik dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk penanggulangan kemiskinan. Tidak sepenuhnya perbankan bersalah karena enggan mengucurkan kreditnya pada usaha mikro. Walaupun ada perbankan yang menyalurkan sebagian kreditnya pada usaha mikro, jumlahnya belum signifikan dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang memerlukan bantuan permodalan.

Salah satu responden wawancara mendalam Pesawaran mengharapkan adanya pinjaman lunak dari pemerintah untuk pengembangan usahanya. Pinjaman lunak dalam artian tanpa bunga dan waktu mengangsur yang panjang.

Namun sedikit berbeda dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh peserta FGD berikut:

“Pada umumnya semua bank ada produk-produknya. Dana di salah satu perbankan ada Rp28 M baru terealisasi Rp25 M. Ini karena tidak ada jaminan dari calon pengguna sehingga bank ragu memberi kredit. Kredit macet untuk usaha kecil besar, jadi bank susah. Contoh Bank Mega Syariah kolaps karena kredit macet. Uang kredit untuk usaha malah untuk foya-foya. Sebaiknya pemerintah memberi jaminan/kebijakan yang jelas sehingga bank lebih tenang untuk memberi kredit.” (Peserta FGD dari unsur perbankan, Tanggamus,2015).

Demikian pola hubungan antara perbankan dengan lembaga keuangan mikro akan menjadi alternatif yang sangat membantu. Dengan demikian, perbankan tidak langsung berhubungan dengan

pelaku usaha, melainkan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan mikro yang selanjutnya akan menyalurkannya pada pelaku usaha mikro. Dalam pola hubungan antara Bank dengan lembaga keuangan mikro ini, Bank akan menyalurkan dana dengan memperhatikan beberapa hal. Antara lain Pola hubungan antara Bank dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat-Mikro. Dalam rangka strategi memperkuat usaha mikro, juga upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan mengatasi pengangguran, pemerintah telah merancang skim kredit usaha mikro untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.

Kredit usaha mikro ini merupakan pengembangan dari Kredit Usaha Rakyat yang terlebih dahulu diluncurkan sejalan dengan amanat Inpres Nomor 6 Tahun 2007. Kebijakan pemerintah ini setidaknya akan berujung pada terciptanya pemberdayaan usaha mikro yang umum digerakkan oleh penduduk miskin. Di sisi lain, penggunaan pola hubungan antara Bank dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diharapkan juga akan semakin memperkuat LKM yang sebagian besar nasabahnya adalah golongan ekonomi lemah. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal maupun informal.

c. Dominasi Perilaku konsumtif bukan produktif dalam masyarakat

Tidak hanya minimnya informasi akan kredit usaha yang menjadi hambatan bagi penduduk miskin untuk mengakses kredit usaha, tetapi *mindset* konsumtif turut menjadi kendala utama. Menurut para *stakeholders* masyarakat Provinsi Lampung masih memiliki pola pikir menggunakan kredit untuk konsumsi tidak untuk pengembangan usaha. Seorang informan memaparkan dalam sebuah wawancara mendalam bahwa tingkat kredit macet pada masyarakat miskin masih cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat miskin menganggap kredit usaha yang mereka terima dari perbankan merupakan bantuan cuma-cuma. Karena merasa tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, masyarakat lebih memilih untuk membelanjakan uang kredit usaha ke dapur dibandingkan membelanjakannya pada modal usaha. Hasil wawancara mendalam di Kabupaten Mesuji ada salah satu responden yang tidak menggunakan dana pinjaman sebagaimana mestinya. Salah satu buruh deres karet meminjam pada PNPM sebesar 5 juta, uang tersebut digunakan untuk biaya sekolah anaknya bukan untuk usaha.

Kondisi lain yang turut berkontribusi mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Namun kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder.

“Kendala yang sering dialami oleh masyarakat dalam menggunakan dana pinjaman karena digunakan untuk keperluan diluar usahanya. Pembinaan telah dilakukan secara rutin setiap tahun 4 kali pembinaan” (peserta FGD Lampung Selatan)

Namun ketika paceklik, pada akhirnya berhutang termasuk kepada lintah darat yang justru semakin memperberat kondisi.

2. Masih rendahnya pembangunan jalur dan sarana pemasaran

Untuk meningkatkan status penghidupan dan ekonomi petani, produk-produk Pertanian tersebut membutuhkan pemasaran yang lebih luas. Pemasaran pada tingkat petani kurang mendapat perhatian dan tidak dipahami. Upaya memperbaiki hubungan dan interaksi pasar, akan memungkinkan untuk memperbaiki penghidupan petani kecil dengan mengarahkan produksi pertanian mereka untuk memenuhi peluang pasar.

Kurangnya kemampuan yang memadai dalam pemasaran, distribusi barang, pengemasan, dan standarisasi produk yang baik serta kurangnya kemampuan manajerial dalam kegiatan usaha menyebabkan UMKM kurang berkembang secara baik dan tidak mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi produk pertanian lokal.

3. Masih rendahnya pendampingan dan pembinaan usaha kepada masyarakat

“jagung manis produk Tanggamus dijual tanpa kemasan. Setelah dilakukan pengemasan jagung manis tersebut menjadi berlabel produksi Bogor dengan harga yang lebih tinggi. Kemampuan UMKM untuk menembus pasar, termasuk supermarket dan waralaba retail, juga kurang disebabkan tidak mampunya UMKM memberikan jaminan distribusi dan pasokan barang” Peserta FGD dari Tanggamus

Seseorang yang tidak ada keahlian meskipun ia mendapatkan pinjaman usaha, maka pinjaman tersebut tidak akan maksimal. Maka perlu ada program pembinaan yang menyentuh masyarakat agar mereka bisa mengelola pinjaman

Infrastruktur sangat penting seperti jalan terutama untuk program-program pemerintah. Tanggamus sebagai sumber produk pertanian seperti sayuran, sapi dan lain-lain ketika harga barang naik harusnya mendapat untung tapi karena jalan rusak jadi terhambat. (peserta FGD Kabupaten Tanggamus)

usaha tersebut dengan baik. Sementara sistem penanggulangan secara dinamis berupa pengembangan usaha produktif, serta bentuk dukungan kelembagaan dan pendampingan, diduga juga sering mengalami kendala (Elfindri, Mahdi,

“Harusnya sudah ada sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan tentang permodalan. Sehingga bila penggunaan modal untuk usaha dagang ya tidak akan digunakan untuk lainnya. Selain itu, setelah diberikan pun jangan diberikan begitu saja, harus ada pengawasan. Biasanya karena minimnya pengawasan inilah yang membuat penyimpangan. (Peserta FGD dari Tulang Bawang Barat)

Hasbullah dan Ridwan, 2005).

Peserta FGD lainnya menjelaskan bahwa selama ini tidak ada sanksi hukum dan sanksi sosial bagi pengguna yang bermasalah. Seperti contoh program KUBE, sebenarnya penggunaannya sudah dibatasi namun tetap saja terealisasi 100 persen dan itu tidak ada sanksi hukum. Semua acuan sudah dikaji dengan baik, tapi

kelemahannya ada di kesadaran masyarakat, sehingga perlu pembinaan tentang pemahaman tersebut.

Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, menyebabkan rasa takut yang tinggi akan terjebak pinjaman. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berupaya melakukan penyuluhan dan pembentukan KUBE.

Demikian menurut Nazara (2011) disarankan agar masyarakat khususnya masyarakat miskin, perlu pendampingan usaha maupun pendampingan berupa pembangunan pola pikir. Hal ini penting mengingat karakteristik masyarakat miskin yang sarat dengan kapasitas pengelolaan usaha yang rendah. Juga horizon pola pikir miopik (*myopia behavior*) yang menitikberatkan perhatian pada keuntungan jangka pendek semata. Sebagian besar (68,97%) modal dari usaha mikro masih bersumber dari pemilik modal sendiri.

4. Infrastruktur jalan belum optimal

Kondisi infrastruktur suatu wilayah akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian wilayah tersebut. Kegiatan perekonomian akan lancar dan berjalan baik bila ditunjang dengan infrastruktur yang baik. Salah satu infrastruktur yang memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian adalah jalan.

Tabel 5.6 Panjang Jalan Negara dan Jalan Provinsi Provinsi Lampung Menurut Kondisi dan Status (Kilometer), 2018

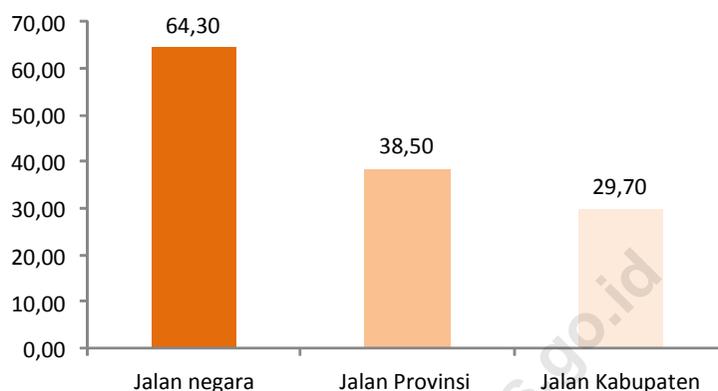
Kondisi Jalan	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Baik	-	1 140 178	1 140 178
Sedang	-	167 481	167 481
Rusak	-	85756	85756
Rusak Berat	-	299 858	299 858

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Lampung, Lampung Dalam Angka 2019

Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung dapat sedikit tergambar dari data yang ditunjukkan oleh tabel di atas. Infrastruktur jalan di Provinsi Lampung didominasi oleh jalan Provinsi. Namun kondisi sebagian jalan ini rusak bahkan rusak berat. Dari total 1.693,27 ribu Km panjang jalan 385,61 ribu Km (23 persen) dalam keadaan rusak.

Dengan adanya dukungan infrastruktur yang baik seperti fasilitas jalan, sarana komunikasi dan keuangan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari peningkatan output yang bermuara pada meningkatnya permintaan kerja, dan berdampak pada pengurangan angka penduduk miskin (Marhaeni dalam Prastyadewi, 2011). Sehingga dengan demikian, tersedianya infrastruktur akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja, peningkatan distribusi produksi barang dan jasa sektor perdagangan, yang berujung pada pengentasan kemiskinan wilayah.

Gambar 5.12 Persepsi Masyarakat yang Menyatakan Jalan Utama Berkualitas menurut Jenis Jalan Provinsi Lampung (Persen), 2015



Sumber: BPS Provinsi Lampung, SHM 2015

Persoalan infrastruktur tidak hanya dari sisi ketersediaan infrastruktur yang sudah cukup memadai, tetapi juga bagaimana kualitasnya. Mudahnnya akses jalan darat antar provinsi dan kabupaten/kota merupakan faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di daerah. Masih relatif rendahnya kualitas infrastruktur jalan Provinsi Lampung ini juga tercermin dari hasil Survei Harapan Masyarakat 2015 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 5.7. Persepsi masyarakat yang menyatakan jalan negara di Provinsi Lampung berkualitas sebesar 64 persen. Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang menilai baik kualitas jalan provinsi maupun jalan kabupaten cukup baik, yakni masing masing sebesar 38 persen dan 30 persen.

Hasil studi David Ray, 2013 bahwa jalan di tingkat provinsi dan kabupaten yang merupakan 91 persen dari jaringan jalan utama, dalam dekade terakhir ini semakin rusak karena tidak memadainya investasi dan implementasi pekerjaan pemeliharaan yang buruk.

Konsekuensinya adalah pengeluaran yang tidak efisien, kerusakan yang cepat, dan biaya tinggi bagi para pengguna jalan. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi

<https://lampung.bps.go.id>

Disparitas Pembangunan Manusia

6

6.1. Disparitas jenis kelamin

Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi. Salah satu tujuan, pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan bagi seluruh penduduk. Untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban untuk menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

Namun, beberapa hal masih belum dapat seperti yang diharapkan dan menyebabkan kemajuan pembangunan manusia menjadi tidak merata. Hal ini berdampak pada lahirnya disparitas pembangunan manusia. Disparitas pembangunan manusia muncul antarindividu, antargender, antardimensi, dan antarwilayah. Disparitas ini tentu harus ditekan dan diupayakan agar hilang. Idealnya, setiap individu mempunyai kesempatan dan pilihan yang sama. Begitu pula dengan kesempatan dan pilihan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tentu saja hal tersebut harus merata di semua wilayah, di manapun mereka berada dan pada dimensi apapun.

Disparitas Antar individu

Fokus dan perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia adalah manusia karena merupakan tujuan akhir pembangunan. Setiap individu harus dapat dipastikan agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Konsep ini akan menjamin bahwa semua individu mempunyai capaian pembangunan manusia yang sama, adil, dan merata.

Kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah dicapai. Disparitas pembangunan manusia yang terjadi antarindividu tidak dapat dihindari. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan untuk memperluas pilihan tidak terdistribusi merata. Sebagian penduduk dapat memperoleh pilihan-pilihannya, sementara yang lain berada dalam keterbatasan pilihan untuk mengakses sumber daya.

Disparitas Gender

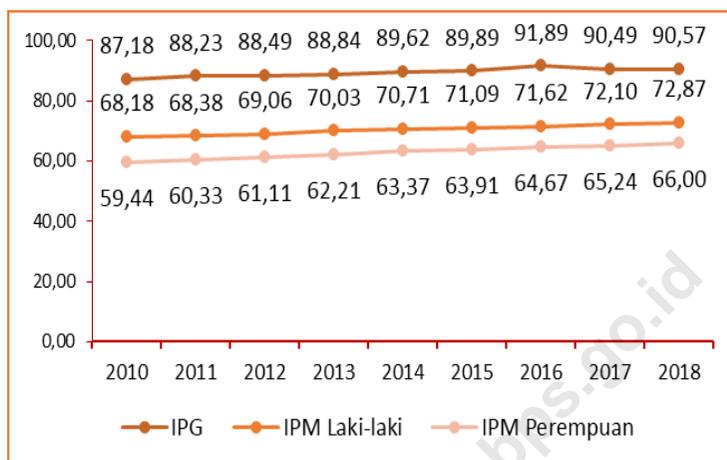
Istilah gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan secara biologis. Konsep gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan, sebab ketidakadilan yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Isu gender memang sudah sejak lama menjadi perhatian dunia. Dalam agenda pembangunan global yang bertajuk *Sustainable Development Goals* (SDGs), isu gender menjadi salah satu target dalam SDGs. Pada goal kelima, *United Nations* (UN) berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia.

UNDP juga sangat menyoroti isu gender dan memasukkannya dalam beberapa indikator yang lebih spesifik. Pada HDR 2010, UNDP telah memperkenalkan dua indikator yang telah mempertimbangkan aspek gender. Kedua indikator itu adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan *Gender Inequality Index* (GII). IPG dihitung untuk melihat capaian pembangunan manusia yang diraih oleh laki-laki dan perempuan, sementara GII lebih menekankan pada disparitas yang terjadi antargender.

Pembangunan manusia yang dicapai laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini tercermin dalam IPG Lampung pada tahun 2018 yang mencapai 90,57. Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Tercatat bahwa IPM laki-laki mencapai 72,87 sementara IPM perempuan sebesar 66,00. Secara konseptual, capaian ini merefleksikan masih adanya disparitas gender.

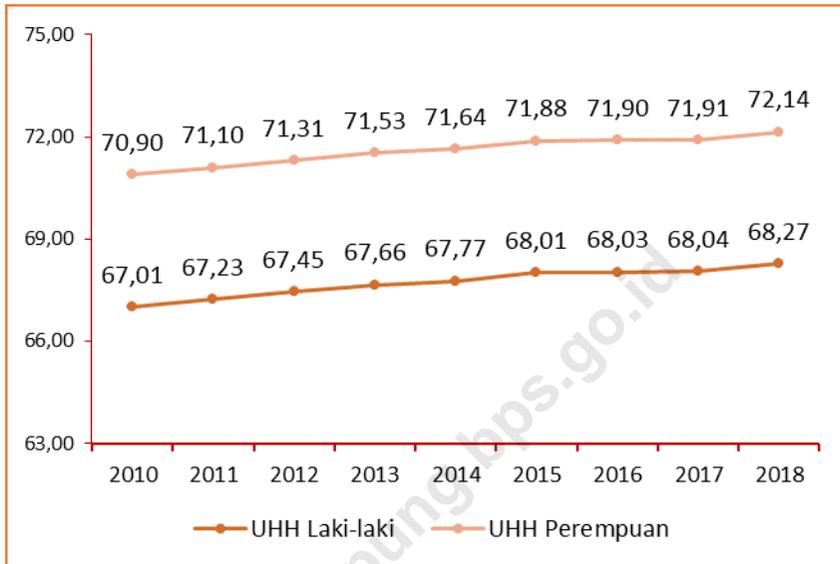
Gambar 6.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung, 2010-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

Aspek pendidikan dan ekonomi perempuan memang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2018, perempuan yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,50 tahun. Sementara laki-laki telah menempuh pendidikan selama 8,14 tahun. Dari sisi ekonomi, rata-rata pendapatan per kapita perempuan di Indonesia yang diproksi dengan rata-rata pengeluaran per kapita sekitar 7,66 juta rupiah selama setahun. Jumlah ini lebih kecil dibanding pengeluaran per kapita laki-laki yang mencapai 14,04 juta rupiah selama setahun. Disparitas gender dari sisi pendidikan memang masih terjadi. Namun, kondisinya lebih baik bila dibandingkan sisi ekonomi. Beberapa indikator pendidikan bahkan telah menunjukkan bahwa capaian perempuan telah melampaui laki-laki, misalnya harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah perempuan pada tahun 2018 tercatat mencapai 12,86 tahun, sementara harapan lama sekolah laki-laki hanya 12,38 tahun.

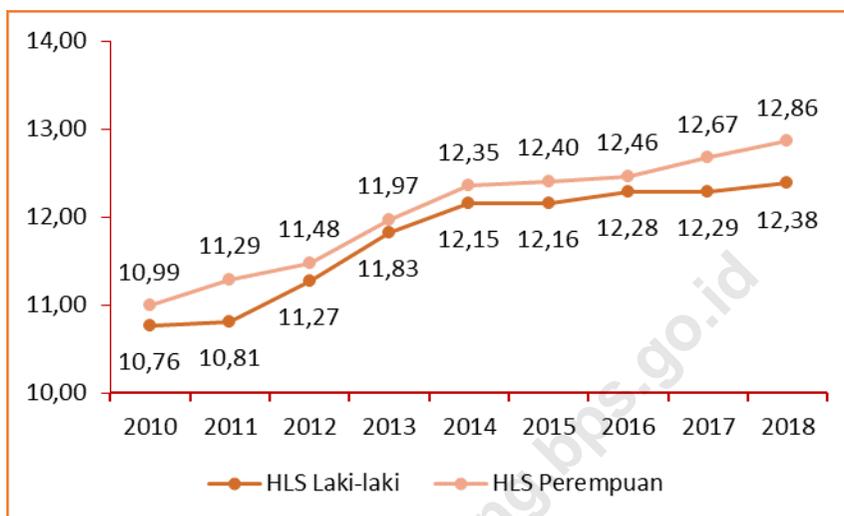
Gambar 6.2 Perkembangan Umur Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2010-2018 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Umur harapan hidup laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung setiap tahun terus meningkat. Namun jika dibandingkan, umur harapan hidup laki-laki di Provinsi Lampung selalu lebih rendah dibandingkan umur harapan hidup perempuan di Provinsi Lampung. Pada tahun 2018, umur harapan hidup perempuan mencapai 72,14 tahun, sedangkan umur harapan laki-laki adalah 68,27 tahun.

Gambar 6.3 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2010-2018 (Tahun)



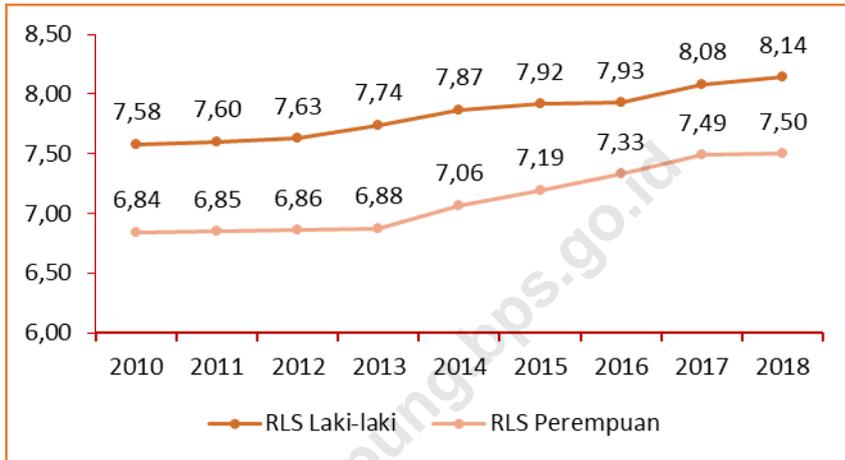
Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada sektor pendidikan harapan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan di tahun 2018 kembali meningkat sebesar 0,48, setelah sebelumnya pada tahun 2016 selisihnya hanya 0,18. Harapan lama sekolah laki-laki di Provinsi Lampung lebih rendah dibandingkan harapan lama sekolah perempuan. Harapan lama sekolah perempuan di tahun 2018 mencapai 12,86 tahun, sedangkan laki-laki sedikit lebih rendah yaitu 12,38 tahun. Secara umum perkembangan harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung terus meningkat selama kurun waktu 2010-2018.

Dari segi rata-rata lama sekolah, perempuan masih lebih rendah rata-rata lama sekolahnya dibandingkan laki-laki. Nilai rata-rata lama sekolah laki-laki di tahun 2018 adalah 8,14 tahun atau setara kelas VIII, sedangkan perempuan adalah 7,50 tahun atau setara kelas

VII. Selama tahun 2010-2018 rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki terus meningkat.

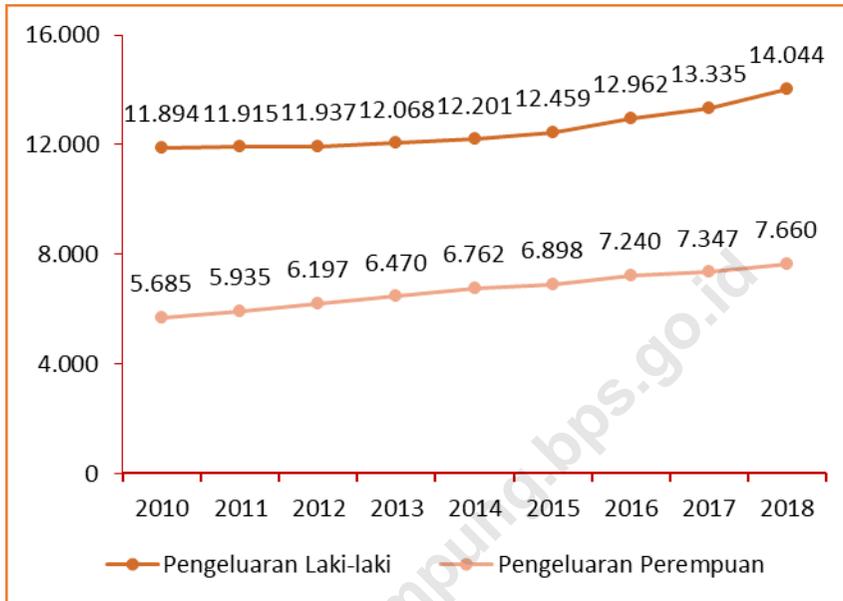
Gambar 6.4 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2010-2018 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari segi pengeluaran, laki-laki jauh lebih tinggi pengeluarannya dibanding perempuan nilainya hampir dua kali pengeluaran perempuan. Pada tahun 2018, pengeluaran laki-laki mencapai 14,04 juta rupiah, sedangkan perempuan hanya 7,66 juta rupiah. Secara umum baik IPM laki-laki dan perempuan, serta indikator-indikator pembentuknya terus meningkat.

Gambar 6.5 Perkembangan Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan Provinsi Lampung, 2010-2018 (Tahun)



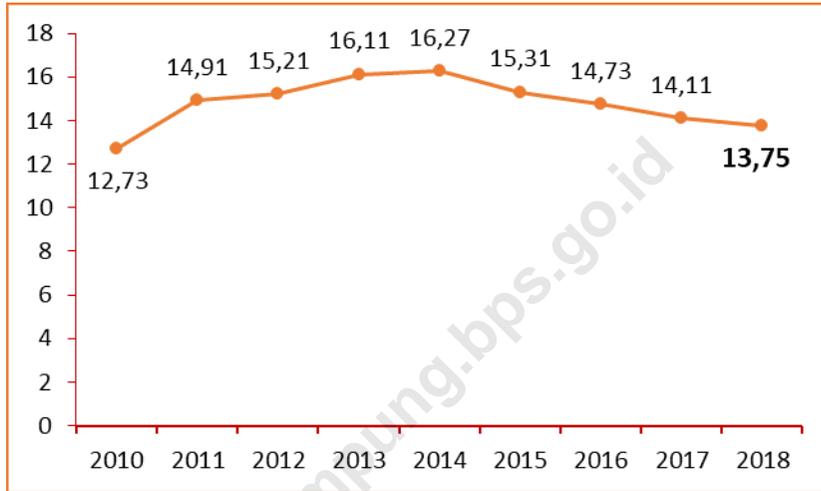
Sumber : Badan Pusat Statistik

6.2. Disparitas antar kabupaten/kota

Disparitas Antar kabupaten/kota Disparitas pembangunan manusia dalam perspektif kabupaten/kota, disparitas menjadi petunjuk penting tentang kinerja yang telah diupayakan pemerintah dalam mendistribusikan pembangunan pada tingkat provinsi. Bagi pemerintah pusat, analisis disparitas di kabupaten/kota yang terjadi di tingkat provinsi akan membantu dalam memberikan fokus perhatian terhadap kemajuan pembangunan manusia. Pada tataran umum, penting untuk melihat disparitas pembangunan manusia melalui indeks pembangunan manusia. Sementara pada tingkat lanjut, disparitas pada setiap dimensi pembentuk pembangunan manusia juga akan memberikan fokus informasi yang lebih detail. Selain terjadi

di tingkat nasional, disparitas pembangunan manusia juga terjadi pada level kabupaten/kota di dalam provinsi.

Gambar 6.6 Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sampai saat ini, disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota juga masih terjadi. Disparitas ini terutama cukup mencolok apabila melihat capaian IPM Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Mesuji. Perbedaan capaian IPM kedua wilayah masih berada pada kisaran 14 poin. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 2010 hingga 2018, perbedaan IPM kedua provinsi cenderung semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas antara kabupaten/kota cenderung mengecil.

Pada tahun 2018, IPM Kota Bandar Lampung tercatat telah mencapai 76,63. Provinsi yang berstatus sebagai ibukota provinsi ini merupakan daerah tingkat II dengan IPM tertinggi di Provinsi Lampung. Sementara itu, capaian IPM Kabupaten Mesuji tercatat

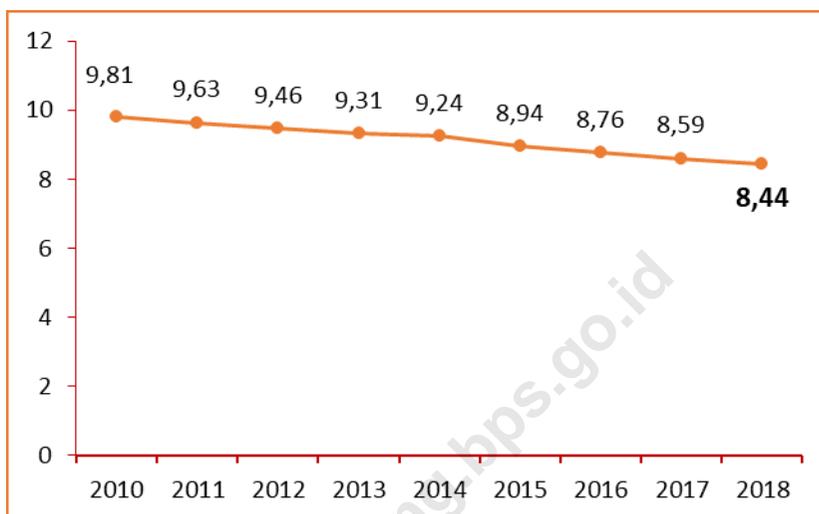
hanya 62,88 dan merupakan yang terendah di Provinsi Lampung. Dengan capaian ini, jarak IPM antara kedua wilayah berselisih sekitar 13,75.

Semakin kecilnya selisih IPM antara Kabupaten Mesuji dengan Kota Bandar Lampung pada tahun terakhir disebabkan oleh peningkatan IPM Kabupaten Mesuji lebih cepat dibandingkan peningkatan IPM Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Mesuji meningkat sebesar 1,01 poin. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan ini berhasil meningkatkan capaian IPM dari 61,87 pada tahun 2017 menjadi 62,88 pada tahun 2018. Sementara itu, peningkatan IPM Kota Bandar Lampung selama 2017-2018 tercatat sebesar 0,65 poin, yaitu dari 75,98 menjadi 76,63.

Disparitas pembangunan manusia pada level kabupaten/kota juga terjadi pada indikator yang membentuknya. Hampir semua indikator menunjukkan perkembangan yang positif. Umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah menunjukkan disparitas yang semakin kecil. Sementara itu, disparitas pengeluaran per kapita masih berfluktuasi diempat tahun terakhir.

Kesehatan merupakan salah satu bagian vital dari kehidupan manusia. Kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung saat ini semakin membaik. Selain membaiknya tingkat kesehatan masyarakat, disparitas tingkat kesehatan antar kabupaten/kota juga semakin kecil. Hal ini terlihat dari tren selisih Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) selama 2010-2018 antara Kabupaten Pesisir Barat dengan Kota Metro yang cenderung menurun.

Gambar 6.7 Selisih Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

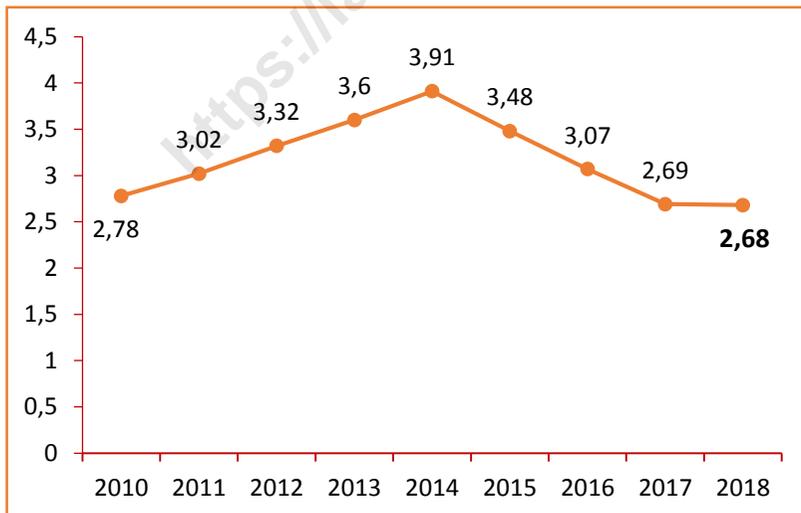
Pada tahun 2018, umur harapan hidup saat lahir di Kota Metro mencapai 71,29 tahun. Salah satu kota yang berpenduduk sekitar 167,7 ribu jiwa pada tahun 2018 (proyeksi penduduk 2015-2025 Provinsi Lampung) ini merupakan daerah tingkat II di Provinsi Lampung yang memiliki umur harapan hidup tertinggi. Sementara itu, kabupaten/kota dengan umur harapan hidup saat lahir paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten paling muda di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk 154,9 ribu jiwa pada tahun 2018 (proyeksi penduduk 2015-2025 Provinsi Lampung) dan secara rata-rata bayi yang baru lahir memiliki umur harapan hidup sekitar 62,85 tahun.

Perkembangan selisih umur harapan hidup antara Kota Metro dengan Kabupaten Pesisir Barat yang semakin menurun dalam kurun waktu 2010-2018 mengindikasikan bahwa disparitas sudah semakin berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten dengan capaian

terendah sudah semakin cepat mengejar ketertinggalannya. Selama kurun waktu 2010 hingga 2018, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Pesisir Barat tumbuh 0,42 persen per tahun. Perkembangan di Kabupaten Pesisir Barat relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan di Kota Metro yang hanya 0,12 persen per tahun.

Di bidang pendidikan, disparitas pembangunan manusia terlihat dari dua indikator pembentuknya, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Gambar 6.8 Selisih Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum, selama kurun waktu 2010 hingga 2014, ketimpangan harapan lama sekolah cenderung meningkat. Namun,

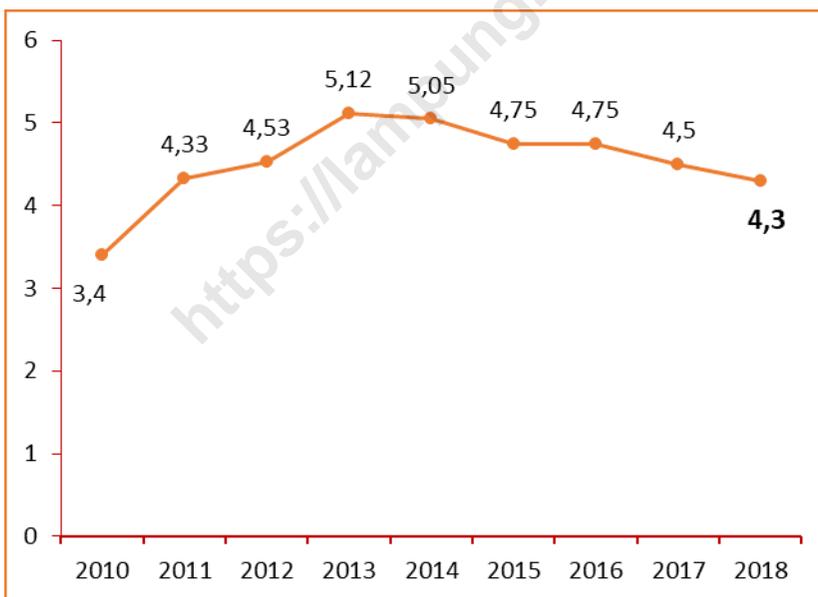
ketimpangan harapan lama sekolah mulai menurun pada periode 2014-2018. Ketimpangan harapan lama sekolah terjadi akibat perbedaan capaian yang cukup signifikan antara Kabupaten Mesuji dengan Kota Metro.

Pada tahun 2018, penduduk usia 7 tahun di Kota Metro memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal hingga mencapai 14,29 tahun atau setara Diploma III. Sementara itu, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Mesuji hanya memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan formal hingga 11,61 tahun atau setara kelas XI. Meskipun tidak setinggi Kota Metro, pertumbuhan harapan lama sekolah di Kabupaten Mesuji selama 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan yang sedikit lebih tinggi. Pertumbuhan harapan lama sekolah di Kabupaten Mesuji selama 2017-2018 mencapai 0,17 persen, sedangkan harapan lama sekolah di Kota Metro tumbuh sebesar 0,07 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi beberapa perbaikan pada aspek pendidikan di Kabupaten Mesuji yang menyebabkan harapan lama sekolah tumbuh sedikit lebih tinggi.

Indikator pendidikan lain yang tercakup dalam penghitungan indeks pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Selisih rata-rata lama sekolah dari tahun 2010-2018 cenderung berada pada kisaran 4,5 tahun. Disparitas ini terjadi akibat perbedaan capaian yang nyata antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Mesuji. Namun demikian, selisih rata-rata lama sekolah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018, yaitu dari 4,5 tahun menjadi 4,3 tahun.

Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah di Kota Bandar Lampung mencapai 10,90 tahun sedangkan Kabupaten Mesuji menempati posisi terbawah dengan capaian 6,60 tahun. Meskipun capaian provinsi Papua paling rendah, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mesuji tumbuh sebesar 3,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Kota Bandar Lampung hanya tumbuh sekitar 0,09 persen. Hal ini menyebabkan perbedaan rata-rata lama sekolah Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Mesuji semakin kecil.

Gambar 6.9 Selisih Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Tahun)

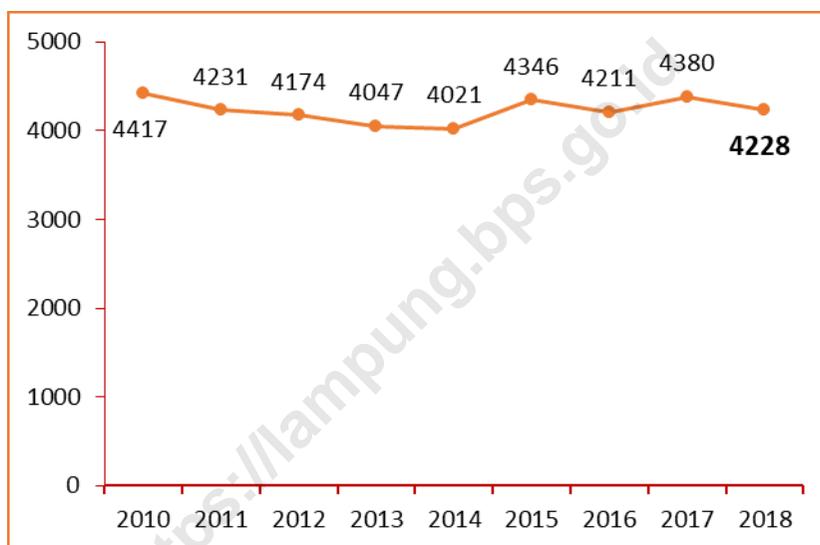


Sumber : Badan Pusat Statistik

Diantara ketiga dimensi yang membentuk pembangunan manusia, dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita cenderung masih mengalami fluktuasi. Disparitas pada

dimensi ini sedikit menurun pada tahun 2018. Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Bandar Lampung mencapai 11,95 juta rupiah. Sementara itu, Kabupaten Pesawaran menempati posisi terbawah dengan capaian sebesar 7,72 juta rupiah.

Gambar 6.10 Selisih Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota Tertinggi dan Kabupaten/Kota Terendah, 2010-2018 (Ribu Rupiah/Tahun)



Secara umum, disparitas pembangunan manusia terjadi di seluruh indikator. Pada tahun 2010-2018, disparitas umur harapan hidup antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung merupakan yang terbaik karena nilainya terus menurun.

Tantangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7

Sejumlah indikator makro ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Capaian pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,25 persen lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 5,17 persen di tengah ketidakpastian perekonomian global dan risiko perang dagang antara Amerika dan China. Sementara itu, tingkat inflasi gabungan 2018 yang tetap terjaga yaitu sebesar 2,73 persen dan tingkat pengangguran Agustus 2018 yang cukup rendah sebesar 4,06 persen .

Namun, pembangunan ekonomi masih menyisakan permasalahan dan tantangan yang tak kunjung selesai. Potret pembangunan sumber daya manusia masih terlihat rendah kualitasnya. Angka kemiskinan tercatat sebesar 13,01 persen pada kondisi September 2018, Sedangkan sumber daya manusia Provinsi Lampung yang tercermin dari angka IPM 2018 sebesar 69,02 masih berstatus “sedang”. Walaupun Indeks Ketimpangan Distribusi Pendapatan sebesar 0,326 pada periode yang sama menunjukkan kondisi yang lebih baik dari Indonesia.

Tingkat ketimpangan antar wilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah. Sebaliknya ketimpangan yang terlalu

tinggi bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, memperlambat pengentasan kemiskinan .

World Bank pada 2015 telah memberikan peringatan. Sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh seperlima penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur masing-masing 71 kali lipat dan 60 kali lipat dibanding PDRB Provinsi Maluku Utara sedangkan PDRB Provinsi Lampung sendiri sebesar 9 Kali lipat dibanding Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, PDRB perkapita Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur masing-masing 13 dan 9 kali lipat dibanding PDRB Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan PDRB Perkapita Lampung 2 kali lipat PDRB Perkapita Nusa Tenggara Timur.

Padahal Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup besar se-Sumatera sebesar 8,4 juta Jiwa tahun 2018, yaitu terbesar kedua setelah Sumatera Utara, bahkan Provinsi Lampung telah memasuki masa bonus demografi sejak tahun 2014. Bonus demografi akan menyebabkan ketergantungan penduduk dimana tingkat penduduk produktif menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah. kondisi tersebut memiliki tantangannya masing-masing. Tantangan masalah *aging population* adalah biaya memelihara kesehatan, dimana orang dengan usia lanjut biasanya dihadapkan dengan banyak masalah kesehatan. Sedangkan tantangan demografi muda adalah pendidikan dan kualitas SDM.

Hal ini akan menguntungkan bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila bonus demografi terjadi. Hal ini membawa angin segar dimana Indonesia khususnya Provinsi Lampung akan mendapatkan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas dalam jangka panjang. Bonus demografi ibarat pedang bermata dua, di satu sisi menjadi potensi apabila mampu mengambil peluang-peluangnya dan di sisi lain akan menjadi boomerang yaitu beban apabila pemerintah tidak siap dengan sumberdaya manusianya. Bonus demografi bisa saja menjadi potensi pembangunan, dengan dua prasyarat berikut:

Pertama adalah tersedianya lapangan kerja yang mencukupi bagi penduduk usia produktif, sehingga penduduk tersebut secara finansial dapat menopang keberadaan penduduk usia non produktif. Kedua, penduduk usia kerja (1 sd 65 tahun) akan benar-benar menjadi produktif manakala dibekali pendidikan dan skill yang memadai. Karena jika tidak, mereka justru akan menambah deretan jumlah pengangguran manakala mereka kalah bersaing dengan pekerja lain dari luar negeri yang mempunyai skill dan kemampuan yang mumpuni.

Data dari hasil survai BPS, menunjukkan bahwa meskipun secara prosentase jumlah pengangguran usia produktif relative stabil dalam tiga tahun terakhir, akan tetapi jumlah absolutnya semakin bertambah banyak. Dengan demikian, secara riil jumlah tersebut akan menambah jumlah penduduk yang non produktif semakin banyak. Jika jumlah penduduk usia non produktif jumlahnya bertambah banyak, maka ini berarti, bahwa prosentase jumlah penduduk usia produktif yang menganggur akan semakin banyak dibandingkan

jumlah usia non produktif atau dengan kata lain rasio ketergantungan usia non produktif terhadap usia produktif semakin tinggi.

Pendidikan kependudukan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah secara tidak langsung akan membentuk atau membina sikap dan perilaku yang responsive terhadap pemecahan masalah kependudukan sejak dini sampai usia lanjut. Dengan proses pembentukan perilaku hidup berwawasan kependudukan melalui proses pendidikan baik formal, melalui kursus dan kediklatan atau melalui pemberian informasi dengan menggunakan institusi keluarga ataupun media yang ada di masyarakat maka diharapkan generasi muda mampu mengetahui, menyadari, dan berperilaku responsive terhadap berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia terutama menghadapi bonus demografi.

Bonus demografi bisa menjadi sebuah potensi atau peluang apabila pemerintah mempersiapkan lapangan kerja. Menurut Ristekdikdik, ada empat bidang garapan yang harus dilakukan agar penduduk dapat bekerja secara optimal. Bidang garapan pertama adalah melindungi penduduk yang sudah bekerja dapat terus bekerja. Kedua, bagaimana membuka kesempatan kerja agar angkatan kerja baru memperoleh tempat untuk bekerja. Ketiga, memfasilitasi penduduk yang bekerja terus bekerja dan memiliki produktifitas yang tinggi. Keempat, menyiapkan angkatan kerja baru agar memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja

Penduduk usia muda merupakan komponen utama untuk konsep *window opportunity*. Penduduk perlu mendapatkan

pendidikan yang memadai, kualitas pekerja penyediaan lapangan kerja yang optimal. Menurut Moertiningsih (2005) dikatakan fenomena ini akan optimal jika tersedia: tenaga kerja berkualitas, tabungan masyarakat yang tinggi, serta meningkatnya partisipasi perempuan, dan pengangguran rendah dan produktif. Bonus demografi selain memberikan keuntungan bagi pemerintah, juga dapat menjadi boomerang apabila pemerintah tidak menyiapkan sumberdaya manusianya maupun lapangan pekerjaannya.

Demikian distribusi kue pembangunan, masih menjadi ujian dan tantangan bagi para ekonom. Menurut teori lingkaran setan kemiskinan, kemiskinan akan mengakibatkan seseorang tidak mampu mengakses pendidikan yang baik. Padahal tingkat dan kualitas pendidikan itu sendiri merupakan kunci bagi seseorang untuk memasuki dunia kerja dan tingkat penghasilan yang dia peroleh kelak. Sedangkan tingkat penghasilan akan menentukan apakah dia mampu mengakses pendidikan yang baik atau tidak, dan begitu seterusnya. Sehingga sebuah ada paradigma, yang miskin akan cenderung untuk terus menjadi miskin. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah mitigasi berupa kebijakan pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan bagi si miskin secara gratis. Pendidikan yang baik merupakan salah satu jalan keluar untuk memotong rantai kemiskinan yang terjadi secara turun temurun.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam menciptakan formula dan strategi kebijakan untuk memerangi atau mereduksi permasalahan tersebut. Sehingga sampai saat ini, Pembangunan manusia masih merupakan isu yang sangat penting.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu negara.

Di dalam konteks negara, pemerintah saat ini berfokus pada bagaimana investasi di bidang SDM Indonesia dilakukan. Melalui APBN, 20 persen dari total anggaran belanja adalah untuk fungsi pendidikan. Namun menurut Menkeu, jumlah anggaran bukanlah jawaban dari masalah pembangunan SDM melainkan bagaimana anggaran tersebut diarahkan dan untuk apa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa ketersediaan dana untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia bukan lagi menjadi permasalahan. Hal ini terlihat dari kemampuan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun ini anggaran belanja negara Rp2.220 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp2.461 triliun, di mana 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan.

Mulai tahun 2020 pemerintah berencana untuk memfokuskan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar SDM Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain terutama dalam menghadapi era industri 4.0. Masalah tersebut menjadi lebih menantang dengan kemajuan teknologi yang cepat saat ini. Kemajuan industri 4.0, artificial intelligence, robotic, crypto currency, dan sebagainya akan mengubah banyak hal seperti jenis pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Belum lagi revolusi Industri 4.0 diterapkan, awal Januari 2019 lalu, telah beredar gagasan baru yang muncul dari peradaban Jepang

yaitu *society 5.0* disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul atas respon revolusi Industri 4.0 sebagai respon perkembangan teknologi yang pesat, tetapi peran masyarakat menjadi pertimbangan atas terjadinya revolusi industri 4.0 ini. Konsep *Society 5.0* menekankan unsur sumber daya manusia (SDM) sebagai sentral (*human centered*). Dengan demikian, kedua konsep tersebut tidak berbeda dalam penerapan teknologi canggih, hanya saja pada konsep *Society 5.0* lebih menitikberatkan pada unsur manusia sebagai pelaku agar semakin berguna bagi kemanusiaan di segala bidang.

Sebagai konsep yang baru, *Society 5.0* akan mengubah konsep revolusi industri 4.0 yang berpotensi mendegradasi peran manusia. *Society 5.0* akan mentransformasi *big data* yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia guna membuka berbagai peluang yang terkait dengan kemanusiaan. Hal ini dilakukan dengan dibentuknya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang mampu mentransformasi hal di atas.

Society 5.0 mendorong penggunaan teknologi baru untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi. Internet bukan hanya sebagai informasi melainkan untuk menjalani kehidupan. Sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. masyarakat 5.0 merupakan masyarakat berbasis teknologi, “teknologi kunci untuk mewujudkan masyarakat ini adalah big data, artificial

intelligence, dan IoT (*Internet of thing*), sehingga perlu menciptakan kemampuan baru

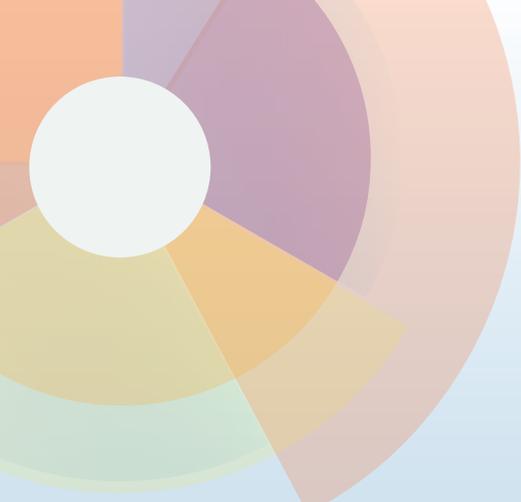
Di sisi lain, era industri 4.0 seperti sekarang ini, kualitas pekerja Indonesia masih jauh dari kata ideal. Padahal dengan SDM yang berkualitas perekonomian suatu negara dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat global. Bila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, dimana pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, di tahun yang sama, *Business World* memaparkan bahwa peringkat daya saing SDM Indonesia berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dari dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 13 dan 22.

Report bank dunia cukup beralasan mengingat para Pekerja Indonesia masih didominasi dengan lulusan pendidikan rendah. Sebanyak 40,51 % (BPS,2019) pekerja hanya lulusan SD. Hal ini menandakan masih rendahnya kualitas pekerja Indonesia yang berakibat minimnya produktivitas hasil pekerjaan itu sendiri. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019 sebesar 42,14 persen tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah. Diikuti dengan tingkat pendidikan SMP dan sederajat sebesar 22,54 persen.

Selain itu, kontribusi para pekerja sektor informal pada perekonomian Lampung cukup besar. Berdasarkan data tersebut 68 persen tenaga kerja di Lampung adalah tenaga kerja informal. Persentase pekerja informal mengalami penurunan sebanyak 2,33 persen poin dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu (Agustus

2018). Atau dengan kata lain, ada kenaikan sebesar 2,33 persen poin pada pekerja formal, yaitu kenaikan pekerja yang berstatus buruh/karyawan.

<https://lampung.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Telukbetung, Bandar Lampung 35215

Telepon : 0721-482909 Faks : 0721-474329

E-mail : bps1800@bps.go.id, homepage : <http://lampung.bps.go.id>

ISBN 978-602-7746-51-0

